



info indonesia

MINGGU II SEPTEMBER 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

Harga @ Rp 20.000,-



Road to
Election
2024

LAWAN ANIES- CAK IMIN KPK BUKAN PRABOWO GANJAR



▶ PELUANG
GANJAR-AHY
TERGANTUNG
MEGA-SBY

▶ PRABOWO KUASAI
JAWA BARAT,
GANJAR DISUKAI
ANAK MUDA

▶ CALON PRESIDEN
PECAH BELAH UMAT
MENAG: JANGAN
DIPILIH!

▶ PRABOWO
MASIH
UNGGUL DI
SUMSEL



INFO REDAKSI

Minggu II • September 2023

“Inilah kesempatan menguji pasangan capres-cawapres juga KPK. Inilah kesempatan untuk masyarakat memperoleh pendidikan politik, untuk melihat bukti komitmen mereka dengan menyatakan dirinya bersih”

Efriza



info indonesia

Kamis, 3 November 2022



INFO PARPOL
PENENTUAN
CAWAPRES TUNGGU
ANGGOTA BARU



INFO OTONOMI
JALAN PROGRAM
PENURUNAN
STUNTING



INFO EKSEKUTIF
KEPALA DAERAH
JANGAN BIKIN
KECEWA

JOKOWI BERNYALI EVALUASI MENTERI

•Kemungkinan Kecil Berujung Reshuffle

JAKARTA - Menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini disambut pro-kontra. Lebih-lebih, situasi krisis ekonomi tahun depan mengharuskan semua menteri kabinet untuk lebih fokus pada tugas utama di pemerintahan.



Jokowi: Nanti Saya Telpun Konfirmasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menunggu tiga minggu untuk memastikan apakah akan menerima konfirmasi keputusannya sebagai Presiden RI ke-7 atau Wakil Presiden RI ke-7. Jokowi mengatakan, dia akan menunggu konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebelum memutuskan apakah akan menerima atau tidak.

info indonesia

Kamis, 4 Agustus 2022



INFO PARPOL
KOALISI TERUS
DIMATANGKAN



INFO OTONOMI
KAWASAN
MANUFAKTUR
KURANG
KEMISKINAN



INFO EKSEKUTIF
LIBATKAN PUBLIK
SUSUN RUKUH

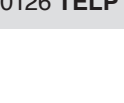
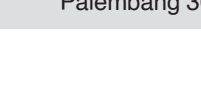
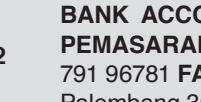
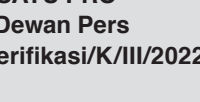
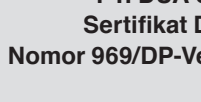
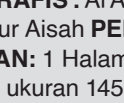
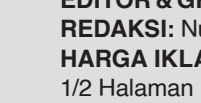
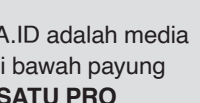
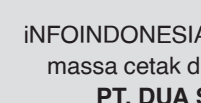
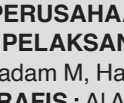
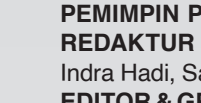
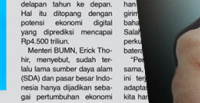
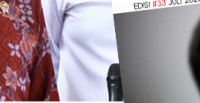
MENTERI NGELET NYAPRES MUNDUR DARI SEKARANG

JAKARTA - Tidak bisa ditutupi, makin hari kian kentara siapa saja menteri yang ngebet mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah mengartikulasikan bahwa yang tidak fokus bekerja karena konsentrasi pecah ke urusan pencalonan. Masalahnya, rasa malu dan etika sudah lama rabi dari nurani para pejabat.

Menurutnya, kegiatan Jokowi atau tidak sudah menjadi urusan menteri yang ngebet mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Presiden Jokowi sendiri sudah mengartikulasikan bahwa yang tidak fokus bekerja karena konsentrasi pecah ke urusan pencalonan. Masalahnya, rasa malu dan etika sudah lama rabi dari nurani para pejabat.

Jokowi sedang menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus bekerja. Jokowi mengatakan, dia akan menunggu konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebelum memutuskan apakah akan menerima atau tidak.

Jokowi sedang menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus bekerja. Jokowi mengatakan, dia akan menunggu konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebelum memutuskan apakah akan menerima atau tidak.



info indonesia

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzan Khan
PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono
WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani
REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina
REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir
EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achilles
TATA LETAK : Sujatniko
MEDIA SOSIAL: Haidir Ali
KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida
SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba
ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina
DISTRIBUSI: Abdul Muchtar
HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.
1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-
BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur
ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telp 021-791 96781
FAX 021-791 96786
PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126
Telp : 0711-7442344



“Menurut saya dugaan korupsi Cak Imin ataupun Anies itu tinggal menunggu bukti-bukti kuat saja yang dimiliki oleh KPK”

Hari Purwanto

LAWAN ANIES-CAK IMIN KPK BUKAN PRABOWO GANJAR

Duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadapi tantangan besar satu bulan jelang pendaftaran capres dan cawapres Pilpres 2024. Kini, lawan yang harus dihadapi pasangan Amin ini bukan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan panggilan dari KPK tak lama setelah deklarasi sebagai cawapres Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya, 2 September 2023.

Dalam pemanggilan tersebut, Cak Imin diketahui diperiksa sebagai saksi seputar kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan alat sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Cak Imin karena Wakil Ketua DPR itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.

Selain itu, Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan juga bisa dikatakan senasib dan sepenanggungan dengan Cak Imin. Anies juga pernah mengalami hal yang sama, yakni dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangunan sirkuit balap mobil listrik Formula E.

Meski Anies dan Cak Imin dipanggil terkait kasus dugaan korupsi yang berbeda, kini keduanya pun tak luput dari topik pembicaraan publik karena terseret kasus dugaan korupsi yang mengharuskan berhubungan dengan KPK. Pasalnya, pemanggilan terhadap Anies dan Cak Imin meski berbeda waktu dan kasus, dilakukan KPK tak lama setelah keduanya resmi dideklarasikan sebagai capres dan cawapres yang diusung Koalisi Perubahan.

Pasca pemanggilan Cak Imin dan Anies terkait kasus dugaan korupsi, saat ini KPK dirundung isu dugaan adanya upaya pengalasan terhadap kedua pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh Koalisi Perubahan tersebut.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai, pemanggilan terhadap Cak Imin dan Anies merupakan murni serangkaian kegiatan proses penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Hari menampik soal kabar isu dan tuduhan sejumlah orang kepada KPK yang menyebut ada dugaan muatan politik atas agenda pemanggilan terhadap Anies dan Cak Imin.

Menurut Hari, sejauh ini, KPK dalam

melakukan dan menjalankan tugasnya, selalu didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat perihal dugaan korupsi yang dilakukan, baik secara individu atau kelompok yang merugikan keuangan negara itu.

“KPK bekerja berdasarkan aturan hukum. Kalau ada yang menganggap politis, memang sudah resmi terdaftar di KPU? Kan belum juga resmi terdaftar, jadi jangan bikin praduga dong soal isu politis. Jadi, biarkan KPK bekerja sesuai aturan hukum, kalau bersih, kenapa harus risih,” kata Hari saat dihubungi Info Indonesia, Jumat, 8 September 2023.

“Menurut saya dugaan korupsi Cak Imin ataupun Anies itu tinggal menunggu bukti-bukti kuat saja yang dimiliki oleh KPK. Dan KPK bekerja sesuai aturan hukum, bukan aturan semauanya sendiri,” sambung Hari.

Hari menuturkan, pemanggilan terhadap Cak Imin dan Anies yang dilakukan paska deklarasi oleh Koalisi Perubahan, sejatinya bukanlah tak bernuansa politis. Hal itu lantaran KPK sejauh ini juga memiliki ketentuan dan prosedur dalam rangka memanggil seorang saksi yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

“Sebenarnya tidak mengejutkan jika KPK tiba-tiba diberitakan seolah-olah memanggil Cak Imin setelah deklarasi. Namun, jika menilik tanggal pemanggilan, minimal surat sampai ke tangan terperiiksa apalagi saksi itu seminggu sebelum waktu pemeriksaan,” ujar Hari.

“Jadi, ini justru bisa diartikan bahwa KPK sudah melayangkan surat panggilan tersebut sebelum deklarasi. Bahkan, mungkin sebelum Cak Imin jumpa petinggi Nasdem untuk membahas koalisi,” sambungnya.

Di sisi lain, Hari juga menyinggung perihal nama Anies Baswedan yang sebelumnya juga ikut terseret kasus dugaan korupsi pembangunan sirkuit balap mobil listrik Formula E yang saat ini penyelidikan masih menggantung di lembaga antis -

uah tersebut.

Hari menyangkan KPK karena penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E itu tak berjalan lagi meski sudah dilakukan pemanggilan kepada sejumlah saksi, salah satunya Anies Baswedan.

“Jadi, khusus untuk Formula E, kasus ini masih menggantung di KPK. Belum terdengar lagi pemeriksaan untuk kasus ini. Padahal, kasus ini tergolong terang benderang,” ungkap Hari.

Dalam hal kasus dugaan korupsi yang menyeret Anies dan Cak Imin, Hari berharap semua pihak tidak lagi membangun spekulasi bahwa kasus itu berkaitan dengan unsur politis. Hal itu lantaran proses penegakan hukum adalah simbol utama dalam mengawal prinsip negara demokrasi.

“Kita dalam hal ini tidak boleh berspekulasi kalau KPK diduga berpolitik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin. Bahkan jika kemudian memutuskan untuk memeriksa Anies Baswedan. Kalau secara fakta hukum, memang kasusnya ada dan perlu dikembangkan dengan memanggil yang bersangkutan,” tutur Hari.

Hari juga menyoroti isu yang telah dibangun oleh sejumlah kelompok yang menuding KPK melakukan unsur politis dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Anies dan Cak Imin.

Menurut Hari, tuduhan KPK melakukan unsur politik dalam pemanggilan Anies dan Cak Imin merupakan aksi guyanan yang belum tentu dibuktikan secara objektif.

“Lucunya lagi, mereka yang mengatakan KPK berpolitik karena memeriksa Cak Imin adalah pihak yang sama yang mengatakan Jaksa Agung berpolitik karena menerbitkan Perja menunda sementara pemeriksaan terhadap peserta pemilu, baik caleg maupun capres/cawapres,” terang Hari.

Hari menambahkan, tuduhan adanya dugaan unsur politis terhadap pemanggilan Anies dan Cak Imin tidaklah mendasar karena KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam bekerja sejatinya telah berpedoman terhadap peraturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

“Lantas standar hukum apa yang mereka pakai? Aparat penegak hukum berpolitik jika mereka atau merik- sa atau

tidak memeriksa peserta pemilu? Mungkin juga mereka akan menuding APH berpolitik sepanjang yang diperiksa adalah gerbong mereka,” tegasnya.

“Penegak hukum justru harus bekerja cepat untuk membongkar kedok para capres atau cawapres agar rakyat tidak terlanjur memilih musang berbulu domba. Justru penegak hukum wajib segera memprosesnya agar terjadi demokrasi sehat dan rakyat tidak salah pilih. Jangan pilih koruptor,” ujarnya.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menilai, narasi tuduhan terhadap KPK berpolitik terhadap pemanggilan Anies dan Cak Imin sebaiknya tidak dilontarkan. Pasalnya, sebagai calon pemimpin semestinya keduanya harus berani menghadapi kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

“Pasangan capres-cawapres Anies-Cak Imin harus menunjukkan perilaku yang baik, langkah terbaik adalah menghadapi kasus yang sedang melanda diri masing-masing. Keduanya tak perlu mengeluarkan narasi politisasi hukum. Nasdem juga tidak perlu khawatir berlebihan,” ujar Efriza.

Menurut Efriza, sikap ksatria dan patriotisme itu dapat dilihat dengan sikap yang berani dari dua calon pemimpin itu dalam menghadapi kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

“Jadi, itu menunjukkan keduanya berjuang membuktikan dirinya bersih. Kriteria nol Anies-Imin ini perlu pembuktian kepada masyarakat. Jangan sekadar klaim, bukti harus ditunjukkan,” tegas Efriza.

Efriza mengimbau agar masyarakat tak terpancing isu dan tuduhan yang telah beredar mengenai dugaan intrik politis lantaran tindakan yang dilakukan KPK. Hal itu seharusnya bisa menjadi ujian terhadap Anies dan Cak Imin sebelum resmi ditetapkan menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2024.

“Inilah kesempatan menguji pasangan capres-cawapres juga KPK. Inilah kesempatan untuk masyarakat memperoleh pendidikan politik, untuk melihat bukti komitmen mereka dengan menyatakan dirinya bersih,” pungkas Efriza. ●RDO





PELUANG GANJAR-AHY TERGANTUNG MEGA-SBY

Utak-atik calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo masih belum menemukan titik terang. Sejumlah nama digadang-gadang layak menjadi pasangan mantan gubernur Jawa Tengah itu. Termasuk Agus Harimurti Yudhoyono yang baru saja ditinggalkan Anies Baswedan yang lebih memilih Muhaimin Iskandar.

Pertemuan antara elite Partai Demokrat dengan PDIP sudah terjadi saat partai berlambang mercu itu masih di Koalisi Perubahan. Bahkan, nama AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, masuk dalam lima kandidat cawapres Ganjar Pranowo.

Apalagi, dalam waktu dekat ini dikabarkan akan dilakukan pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut pastinya akan mencuri perhatian publik. Sebab, wacana yang mencuat di publik, hubungan Megawati dan SBY masih memanas. Pertemuan tersebut bisa saja menjadi momentum keduanya melakukan konsolidasi untuk membangun harmonisasi, termasuk menjodohkan Ganjar Pranowo dengan AHY.

Pengamat politik Muslim Arbi, menilai, pertemuan Megawati dengan SBY harus disambut baik seluruh pihak, terutama elite politik. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah tepat yang diambil oleh Partai Demokrat.

“Soal rencana pertemuan Mega dan SBY, menurut saya, malah bagus,” tutur Muslim Arbi, Rabu, 6 September 2023.

Dia memprediksi Megawati dan SBY akan kembali merajut hubungan pertemu-

manan. Sehingga, keduanya bisa bergandengan tangan dalam menghadapi Pilpres 2024.

Dia menuturkan, kala SBY memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Megawati dan mencalonkan diri sebagai presiden dengan wakilnya Jusuf Kalla, hal itu membuat orang nomor satu di partai banteng itu kecewa.

Berjalannya waktu, SBY dan Megawati pun masih terlibat aktif dalam dunia perpolitikan nasional. Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun politik. Kedua tokoh ini pastinya memiliki pandangan politik yang berbeda, termasuk soal capres dan cawapres dari partai masing-masing.

Sehingga, pertemuan tersebut bisa menjadi momentum untuk menyatukan perbedaan itu. Kata dia, SBY dan Mega akan membahas mengenai dinamika politik yang terjadi saat ini termasuk capres dan cawapres.

“Bisa saja agenda utamanya adalah memformat capres-cawapres dari PDIP-Demokrat,” ucap Muslim Arbi.

Dia menilai, kemungkinan besar pertemuan SBY dan Megawati itu untuk menggodok duet pasangan Ganjar Pranowo-AHY di Pilpres 2024. Menurut Muslim Arbi, Ganjar dan AHY merupakan pasangan yang saling melengkapi.

“Bisa jadi PDIP-Demokrat akan pasang Ganjar-AHY,” kata Muslim Arbi.

Dia mengatakan, keretakan yang terjadi di internal Koalisi Perubahan membuat Partai Demokrat berpikir rasional. Partai Demokrat pastinya tidak ingin lagi dikecewakan. Sebab, munculnya duet Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang se-

cara tiba-tiba diputuskan itu telah meruntuhkan kepercayaan Partai

Demokrat terhadap Koalisi Perubahan.

“Rupanya itu jadi pukulan bagi SBY dan Demokrat. Demokrat lalu keluar koalisi, meski belakangan melunak. Jadi, saya kira agenda utama rencana pertemuan Mega-SBY adalah bisa jadi membicarakan rencana koalisi PDIP-Demokrat,” sambungnya.

Sementara itu, analisis politik dari Citra Institute, Efriza, menuturkan, duet pasangan Ganjar-AHY akan mengubah peta politik yang terjadi saat ini. Bahkan, akan melanjutkan koalisi yang saat ini sudah terbentuk, seperti Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan.

“Partai Demokrat jika berkoalisi dengan PDIP akan menjadi sebuah ekspresi kekaguman. Ini adalah Koalisi Persatuan Indonesia, layaknya sila ketiga, koalisi terbaik di era reformasi selama terjadinya pilpres,” kata Efriza.

Dia menilai, duet Ganjar-AHY sebenarnya amat dinantikan oleh masyarakat. Dia memprediksi bahwa pasangan tersebut juga akan mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat.

Dia meyakini, Ganjar-AHY bisa melanjutkan program dan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama menjabat. Apalagi, SBY dan Megawati juga pernah menduduki kursi RI-1. Sehingga, kedua tokoh tersebut dapat saling berkolaborasi untuk pembangunan Indonesia ke depannya.

“Ini menunjukkan pemerintahan akan berjalan berkelanjutan, tidak ada lagi pilah dan pilih kebijakan, seperti ini milik Partai Demokrat dan ini karya PDIP. Artinya beberapa proyek mandek bisa dilanjutkan,” terang Efriza.

Dia juga menilai sosok AHY memang diperhitungkan oleh PDIP. Sebab, AHY masuk bursa kandidat cawapres potensial Ganjar Pranowo. Tidak hanya itu, Megawati juga telah memberikan lampu hijau bagi Partai Demokrat jika ingin berkoalisi dengan PDIP.

“Kedua partai ini sama-sama beruntung, karena PDIP bisa melakukan suksesi,”

sesi kepemimpinan,” tutur Efriza.

Efriza menambahkan, Ganjar-AHY juga akan membuat anak-anak muda antusias untuk ikut dalam partisipasi di Pilpres. Sebab, keduanya capres dan cawapres yang didukung oleh kalangan muda.

“Keduanya juga dalam kapasitas elektabilitas sama-sama tinggi, akan saling menguatkan antar capres dan cawapres,” jelas Efriza.

Dia meyakini jika koalisi PDIP-Demokrat terwujud, kemungkinan besar Presiden Jokowi akan mendukung penuh duet Ganjar Pranowo-AHY di Pilpres. Hal ini juga akan membuat getir duet pasangan lain.

“Jika koalisi ini dapat terwujud, diyakini Presiden Jokowi akan mendukungnya,” ucap Efriza.

Selain itu, Jokowi juga pastinya akan percaya terhadap pasangan tersebut terkait keberlanjutan program dan pembangunan yang selama ini dikerjakan. “Sehingga bisa memberikan hal positif atas kebijakan Jokowi saat ini,” kata Efriza.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai Partai Demokrat akan lebih condong berkoalisi ke PDIP usai menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan.

Yunarto menganggap hal itu dapat diterka dari pujian SBY terkait manuver PDIP lewat pertemuan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan AHY beberapa waktu lalu. Pujian tersebut terlontar dari SBY setelah Demokrat dikhianati oleh Anies yang lebih memilih Cak Imin.

“Kalau mau diterka dalam beberapa bulan ke belakang, kita bisa menerka komunikasi politik lebih banyak dilakukan dan yang cukup mencengangkan adalah pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY. Sesuatu yang dianggap tadinya oleh pengamat, kalangan dunia politik hampir tidak mungkin dilakukan karena sentimen sejarah tidak baik,” ujarnya, Senin, 4 September 2023.

Selain pujian SBY terhadap pertemuan Puan-AHY, Yunarto menganggap cuitan SBY mengenai mimpinya tentang pertemuan antara Megawati, Presiden Jokowi, dan presiden ke-8 terpilih dalam sebuah kereta api Gajayana menuju tempat tujuan masing-masing dapat diterka sebagai dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

“Saya pikir itu sebuah sikap pribadi yang saya pikir akan tercermin juga di sikap Partai Demokrat, arahnya lebih kepada koalisi dengan kubu Mas Ganjar,” katanya.

Secara garis besar, Yunarto pun menganggap Demokrat tidak bisa berlama-lama larut dalam kekecewaan setelah Anies dipasangkan dengan Cak Imin oleh NasDem. Sehingga, dirinya mewanti-wanti agar Demokrat segera bergabung di antara kubu koalisi Prabowo atau Ganjar dalam rangka tidak luput dalam pemberitaan terkait Pilpres 2024.

Tak hanya terkait Pilpres, jika memang Demokrat akhirnya memutuskan berkoalisi dengan PDIP, maka akan terwujud pula rekonsiliasi antara SBY dan Megawati yang dianggap telah lama terjadi sejak Pemilu 2004. ●RDO





“Pak Erick itu bisa langgeng menjadi cawapresnya Pak Prabowo bila diperintah oleh Pak Jokowi”

Hendri Satrio

PRABOWO PILIH ERICK THOHIR PERINTAH JOKOWI, REBUT SUARA NU

Penentuan sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 diperkirakan tak luput dari bayang-bayang pengaruh Presiden Joko Widodo dan kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Prabowo diasosiasikan sebagai titisan Presiden Jokowi yang sudah dua kali maju Pilpres dan menang berturut-turut, sehingga tak bisa lagi nyapres untuk ketiga kalinya, mengingat UUD 1945 mengamanatkan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

Indikasi kuat Prabowo merupakan wajah lain Jokowi, dibuktikan dari visi misinya hingga nama gerbong pengusungnya yang semula bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah tiba-tiba menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususnya ketika Partai Golkar dan PAN masuk ke dalam barisan.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai, pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 jauh berbeda dibandingkan dengan Pilpres 2014 dan 2019. Saat itu, Prabowo tidak sama sekali diendorse oleh sosok kuat di negeri ini.

“Karena ini kan Pak Prabowo anak buahnya Pak Jokowi. Dia nampaknya beberapa kali sulit mencitrakan diri sebagai pemimpin parpol yang independen, karena semuanya tergantung Pak Jokowi. Hasrat nyapresnya lebih tinggi daripada hasrat menjadi ketum (ketua umum) yang independen,” ujar Hendri Satrio kepada Info Indonesia, Jumat, 8 September 2023.

Dia menjelaskan, dari tiga poros koalisi yang terbentuk jelang Pilpres 2024, Jokowi p a l -

ing bisa mengendalikan poros koalisi pendukung Prabowo. Sementara, barisan partai politik yang mendukung Anies Baswedan yaitu Koalisi Perubahan, dan koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo tidak bisa dicampuri.

“Saya percaya saat ini ada tiga partai koalisi yang enggak bisa diatur Pak Jokowi. Pertama PDI Perjuangan, kedua Nasdem, dan ketiga PKB. Jadi kalau mau mengobrak-abrik sulit, karena PDIP tegak lurus ke Bu Mega bukan ke Pak Jokowi. Itu mungkin yang dirasa tidak mengenakan buat Pak Jokowi karena di Gerindra saja ketumnya yang mau tegak lurus ke dirinya,” tuturnya.

Hensat meyakini, pengaruh Jokowi kepada Prabowo bisa sampai menyentuh ranah penentuan cawapres yang akan diusung KIM. Pasalnya, dia melihat komposisi parpol yang ada di dalam koalisi ini merupakan pendukung pemerintahan dengan nama Kabinet Indonesia Maju.

Dia menyebutkan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, adalah Menteri Perdagangan.

Memperhatikan hal tersebut, Hensat meyakini Golkar dan PAN menitipkan nama kepada Prabowo untuk dipertimbangkan menjadi cawapresnya. Sebut saja Golkar yang dalam kesepakatan di Rakernasnya mengamanatkan Airlangga sebagai

capres atau cawapres. Sementara, PAN mengusulkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir.

Mengenai peluang dua sosok tersebut, Hensat menilai baik Airlangga maupun Erick Thohir terbilang sebagai nama utama yang dapat dipilih Prabowo karena berada dalam perahu yang sama. Namun, persentasenya punya perbedaan.

“Nampaknya, kalau masih ada Golkar, Erick Thohir akan sulit menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena PAN suaranya jauh lebih kecil dibandingkan Golkar. Tapi, Pak Erick itu bisa langgeng menjadi cawapresnya Pak Prabowo bila diperintah oleh Pak Jokowi,” ucap Hensat.

Pengajar ilmu politik Universitas Paramadina itu meyakini, Prabowo akan dibisiki Jokowi untuk memilih Erick Thohir. Sebabnya, kemungkinan sosok itu akan memenuhi logistik yang diperlukan untuk kemenangan Pilpres 2024. Namun, berbeda halnya jika Prabowo memilih Airlangga, yang menurutnya dari segi elektoral lebih mampu mendongkrak tapi tidak untuk logistiknya.

“Jadi Pak Prabowo diperintahkan untuk mengambil Erick, itu jadi dia menjadi bacawapresnya Pak Prabowo. Tapi kalau hitung-hitungan politik kan udah enggak mungkin. Jadi, Pak Prabowonya diperintah dan kemudian Airlangga juga diperintah,” ungkapnya.

Bahkan, Hensat membedakan kekuatan elektoral Erick Thohir dengan putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, yang beberapa hari lalu bertemu dengan Prabowo.

“Kalau pemilihan itu kan enggak melulu tentang suara, tapi juga ada logistiknya. Kalau logistik, Erick Thohir dipersepsikan lebih kuat dibanding Yenny Wahid. Tapi kalau secara suara, Erick Thohir ketinggalan sama Yenny Wahid. Erick Thohir kan enggak punya massa. Jadi Banser juga baru kemarin,” tegasnya.

Sementara, Ketua Rel-

awan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, tak memungkiri peluang Prabowo memilih Erick Thohir sangat terbuka. Pasalnya, dari beberapa nama yang santer beredar juga terdapat nama mantan pemilik klub sepak bola Italia Inter Milan itu.

“Kemungkinan itu kan selalu ada. Kemungkinan Erick Thohir, kemungkinan saya, kemungkinan Budiman Sudjatmiko, kemungkinan siapapun, kemungkinan Mas Ganjar. Segala kemungkinan terbuka,” ujar Immanuel Ebenezer kepada Info Indonesia.

Dia menjelaskan, Prabowo punya penilaian tertentu dalam menentukan sosok yang cocok mendampinginya sebagai cawapres di Pilpres 2024. Salah satunya adalah terkait komitmen mengawal keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi yang selama dua periode menjabat.

“Yang jelas, kami berharap siapapun pendamping Pak Prabowo itu bisa menambah elektoral, selain punya komitmen untuk punya totalitas dan loyalitas di pemerintahan Pak Prabowo di 2024 nanti, selain Pak Prabowo ada (tugas) juga menjaga legacy program Pak Jokowi yang tersisa. Kita kan pendukung Pak Jokowi,” ucap mantan Aktivis 98 itu.

“Kan kita bukan bicara tentang kekuasaan. Kita bicara tentang cita-cita, kita bicara tentang demokrasi, jadi kita kesampingkan urusan kekuasaan. Yang kita tonjolkan ke depan itu adalah program dan gagasan terkait Indonesia, persatuan Indonesia, atau Indonesia bicara rekonsiliasi,” tandasnya.

• RDO



“Komisioner ini betul-betul jangan sampai dituding sebagai perpanjangan tangan siapapun. Sekali muncul, akan terstigma mereka tidak diterima, dan ini bisa menjadi investasi ketidakpercayaan dan menimbulkan sengketa Pemilu”

Prof. Siti Zuhro.



NGGAK AKUR-AKUR BAWASLU-KPU TERUS SALING LAPOR

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 hingga 150-an hari menuju pencoblosan masih saja diwarnai silang sengketa antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

barat dua sisi mata uang, tugas dan fungsi KPU adalah panitia penyelenggaraan pesta demokrasi yang dipelototi oleh Bawaslu guna memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip konsitusional, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).

Dalam beberapa kali tahapan krusial Pemilu Serentak 2024, Bawaslu dan KPU kerap memunculkan perseteruan pendapat. Sebut saja yang baru-baru ini terjadi dalam tahapan pencalonan anggota legislatif di DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan itu, Bawaslu merasa dijegal kinerja pengawasannya oleh KPU. Sebab, sistem informasi pencalonan (Silon) yang dimanfaatkan KPU sebagai instrument pendaftaran hingga verifikasi data serta dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) dibatasi, bahkan ditutup aksesnya.

Setelah hampir lima kali berkirim surat ke KPU untuk permohonan membuka akses Silon, Bawaslu tak mendapat respon yang sesuai harapannya. Alih-alih, justru 9.919 nama bakal caleg ditetapkan masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) tanpa ada pengawasan melekat dari pengawas Pemilu.

Karena dirasa menyalahi aturan, akhirnya Bawaslu memilih mengadukan KPU akibat pembatasan akses Silon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

Sidang perkara yang diadakan Bawaslu tersebut digelar pada Senin, 4 September 2023, dan dihadiri oleh 7 Anggota KPU yang antara lain Hasyim Asyari sebagai Ketua, serta 6 ketua divisi yakni Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, dan Parsadaan Harahap. Mereka disebut sebagai Teradu I hingga Teradu VII.

Sementara, dari Bawa-

slu yang disebut sebagai pihak Pengadu di antaranya hadir Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang didampingi oleh Anggota Bawaslu yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty, serta Anggota Bawaslu yang menjabat Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono.

Dalam momen tersebut, Ketua KPU Hasyim Asyari membantah membatasi Silon kepada Bawaslu, dengan mengklaim mengikuti aturan hukum terkait perlindungan data pribadi masyarakat, sehingga akses Silon kepada Bawaslu tidak dibuka maksimal, melainkan hanya diberikan ketika ditemukan dugaan pelanggaran.

“Tidaklah benar jika para Teradu (KPU) dianggap melakukan pembatasan para Pengadu (Bawaslu) ihwal data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Mes-tinya para Pengadu memahami langkah-langkah para Teradu dalam konteks menjalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Kebijakan yang dimaksud juga berlaku pada Pemilu 2019 ketika saya sebagai teradu juga menjadi bagian dari anggota KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2019,” ucap Hasyim di hadapan Majelis siding yang dipimpin Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Sementara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersikukuh KPU tidak menjalankan tugas sesuai PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota Legislatif, serta disebut melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemilu, Peraturan PKPU 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Karenanya, dia meminta kepada DKPP agar menjatuhkan hukuman tegas kepada se-

luruh pimpinan KPU, karena adanya Silon dalam tahapan pencalonan anggota legislatif oleh KPU. “Memohon kepada DKPP memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada,” pinta Bagja saat membacakan petitumnya dalam persidangan.

Yang menarik, dalam sidang tersebut juga dihadirkan mantan Ketua Bawaslu periode 2013-2017 yang juga Ketua DKPP periode 2017-2022, Prof. Muhammad, yang bertindak sebagai saksi ahli menjelaskan tentang kedudukan hukum KPU, Bawaslu, dan juga DKPP dalam sistem ketata negaraan di Indonesia dalam hal Pemilu.

“Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih DPD secara langsung oleh rakyat, UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 7,” urai Prof. Muhammad.

Makna satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu itu adalah antara KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki prinsip atau nilai kesetaraan dan kesamaan dalam satu tujuan, yaitu menyelenggarakan pemilu. Walalupun dalam praktik kerjanya terdapat karakteristik fungsi masing-masing.

“KPU konsen pada tata kelola teknis pemilu, Bawaslu konsen pada tata kelola pengawasan pemilu, dan DKPP konsen pada tata kelola perilaku penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Dari situ, dia menyatakan bahwa ketiga lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki prinsip atau nilai kesetaraan

atau kesamaan dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang sesuai azas konstitusional, sebagai hadirnya tanggung jawab bersama atau kolektif.

“Untuk mewujudkan efektivitas tanggung jawab kolektif tersebut, secara khusus KPU dan Bawaslu perlu untuk saling terbuka, saling mendukung, saling bantu membantu, saling melengkapi,

saling menguatkan, saling mengoreksi dalam makna positif,” tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Muhammad memandang KPU dan Bawaslu seharusnya saling berkolaborasi untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas di 2024. Bukan justru seperti berkontestasi dan makin memperkeruh suasana politik menjadi semakin tak menentu dengan silang sengketa permasalahan hukum di antara keduanya.

“Pembatasan durasi sekitar 15 menit pada tahap verifikasi administrasi kurang atau tidak memadai untuk mendapatkan hasil pengawasan yang cermat, kredibel dan akuntabel. Idealnya, durasi ditambah atau tetap ditentukan durasi waktunya. Karena, KPU berkepentingan memastikan terlaksananya PKPU terkait jadwal, program dan tahapan memenuhi azas kepastian hukum,” ungkapnya.

“UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi argumentasi KPU dalam membatasi akses Silon tidak tepat jika diberlakukan pula kepada Bawaslu sebagai bagian integral penyelenggara Pemilu. Pembatasan akses Silon atas data dan dokumen persyaratan pencalonan hanya diberlakukan kepada pihak publik luar penyelenggara Pemilu,” tegas Prof. Muhammad.

Cara pandang pelaksanaan pemilu yang berintegritas bermula dari profesionalitas para penyelenggara pemilu juga datang dari Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro.

Belakangan ini, dia memperhatikan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dihantui meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP yang diisukan berkelindan dengan partai politik yang notabene sebagai kontestan pemilu.

“Terus terang, penyelenggara sudah membuat catatan tersendiri, bermasalah dengan parpol. Parpol yang diuntungkan, dan publik yang sudah menaruh trust-nya berkurang atau public distrust, dan itu bisa akumulatif. Tolonglah penyelenggara pemilu (yang di antaranya) KPU, Bawaslu, dan DKPP itu berfungsi efektif, melakukan tugasnya secara profesional, jangan partisan,” ujar Siti Zuhro dalam diskusi KedaiKOPI di bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 8 September 2023.

Sosok yang kerap disapa Mbak Wi itu menyayangkan kualitas kepemimpinan lembaga penyelenggara pemilu sekarang semacam ikut berkontestasi dengan peserta pemilu. Padahal, kepemimpinan KPU dan Bawaslu yang terpilih dari hasil seleksi saat dirinya ikut menjadi tim seleksi, tidak pernah macam-macam atau aneh-aneh dalam menjalankan tugasnya.

“Saya ini mantan Timsel KPU dan Bawaslu tahun 2013 dan 2014. Alhamdulillah enggak ada yang dipenjara, karena saya comel banget, vocal poinnya Timsel. Jadi kalau timselnya partisan, maka anggotanya kacau. Ini saya sering mendengarkan bukan hanya dari teman-teman media, tapi juga di kampus,” ucapnya. ●RDO





“Kami lihat (rencana) itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan, mereka merasa mampu, why not di bulan September”

Tito Karnavian

INFO
KPU

7

Minggu II • September 2023

PILKADA DIMAJUKAN, KPU MINTA TAMBAH ANGGARAN

Belakangan ini isu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 dimajukan mencuat ke publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan sudah menyatakan kesediaan jika ada aturan yang jelas.

Munculnya wacana memajukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 awalnya datang dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Dia menyebutkan pemerintah berencana menerbitkan Perppu tentang Pilkada.

Mardani menyebutkan, secara resmi pemerintah belum menyerahkan draf Perppu Pilkada itu ke DPR. Meski demikian, sudah ada pembicaraan informal terkait Perppu ini.

Dia mengaku belum tahu secara detail isi Perppu Pilkada itu nanti. Meski demikian, poin pentingnya yaitu hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan dipercepat dua bulan.

“Kalau secara umum sih tadi, dari November (2024) mau ditarik ke September (2024). Alasannya dua. Satu ingin keserentakan, jadi kalau bisa pelantikannya di awal 2025, semuanya. Yang kedua, KPU mengatakan bisa untuk melakukan arrangement (susunan) prosesnya,” ujar Mardani, 29 Agustus 2023.

Komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, menyatakan pihaknya siap menggelar Pilkada Serentak 2024 pada September apabila memang diperintahkan oleh Perppu Pilkada. Kendati begitu, KPU mengakui bahwa beban kerja akan bertambah. Pasalnya, tahapan akhir Pemilu 2024 akan berlangsung bersamaan dengan tahapan awal Pilkada 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah simulasi apabila Pilkada 2024 dipercepat dua bulan.

“Sudah (siapkan simulasi apabila Pilkada 2024 dipercepat dua bulan) karena KPU pelaksana undang-undang. Jadi, apapun ketentuan undang-undangnya, KPU harus siap,” ujar Hasyim.

Hasyim berpendapat, pada dasarnya tidak ada permasalahan yang berarti apabila pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dua bulan. Dia menjelaskan, hasil Pileg 2024 sudah harus ditetapkan oleh KPU pada 20 Maret 2024. Oleh sebab itu, pada saat itu sudah dapat dihitung perolehan kursi masing-masing partai politik di DPRD.

“Jadi sudah ketahuan

partai mana yang bisa sendirian mencalonkan kepala daerah yang punya kursi minimal 20 persen di DPRD masing-masing, mana yang belum sehingga perlu kualifikasi dan sebagainya. Sesungguhnya dari situ sudah bisa diketahui karena sidang di MK hasil pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota kecenderungannya antar calon di awal-awal. Jadi suara akumulasi partai kan tidak berpengaruh,” jelas Hasyim.

Meski begitu, Hasyim juga meminta pemerintah memberikan dukungan teknis dan anggaran agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan seluruh tahapan pilkada dengan optimal.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, tidak mempersoalkan wacana Pilkada 2024 dimajukan, namun keputusan itu harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu akan tetap membangun komitmen untuk mematuhi perintah UU, termasuk jika Pilkada dimajukan.

“Iya begitu diperintahkan UU, siap tidak siap Bawaslu harus siap,” kata Bagja, Jumat, 8 September 2023.

Bagja berharap, sebelum putusan itu direalisasikan, pemerintah dapat melakukan langkah mitigasi mengenai potensi risiko yang akan muncul apabila Pilkada dimajukan. Salah satunya persiapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang harus diselesaikan dalam rangka membantu pelaksanaan teknis di lapangan.

Menurut Bagja, kesiapan untuk mengalokasikan NPHD kepada pemerintah daerah dilakukan agar penyelenggara Pemilu dapat fokus

pelaksanaan teknis yang dibantu pemerintah daerah.

Selain itu, Bagja memastikan, pihaknya bakal melakukan langkah mitigasi apabila wacana Pilkada dimajukan terealisasi. Langkah mitigasi harus dilakukan untuk mencegah risiko yang muncul terkait teknis penyelenggaraan Pilkada.

“Jadi pasti kami akan membuat langkah mitigasi terhadap beberapa persoalan yang nanti mungkin muncul. Ini yang perlu dipersiapkan,” tegas Bagja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons positif rencana mempercepat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, dari awalnya November menjadi September 2024. Menurut dia, rencana tersebut cukup rasional asalkan KPU sanggup melaksanakannya.

“Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat (rencana) itu cukup rasional sepanjang KPU siap untuk mengerjakan, mereka merasa mampu, why not di bulan September,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Tito mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan rencana mempercepat Pilkada ini dengan KPU. KPU mengaku bisa mengatur skenario tahapan yang memungkinkan hari pencoblosan Pilkada Serentak pada September 2024.

Mantan kapolri itu menjelaskan, rencana mempercepat Pilkada Serentak 2024 menjadi September cukup rasional karena bisa mewujudkan keserentakan pelantikan. Dengan asumsi terjadi sengketa hasil pilkada di sejumlah daerah selama tiga bulan, maka semua perkara sudah tuntas pada

akhir Desember dan semua kepala daerah terpilih bisa dilantik pada 1 Januari 2025.

Menurut dia, keserentakan pelantikan ini penting untuk memastikan rencana pembangunan kepala daerah sejalan dengan rencana pembangunan presiden baru. Sebagai catatan, presiden terpilih hasil Pilpres 2024 akan dilantik pada Oktober 2024.

“Itu (pelantikan kepala daerah secara serentak pada 1 Januari 2025) hanya berjarak dua bulan dengan pelantikan presiden. Sehingga, mereka (presiden dan kepala daerah) bisa paralel. Jadi sistem pemerintahan kita, pembangunan kita lima tahun ke depan akan lebih sinkron,” ujar Tito.

Tito menambahkan, mempercepat gelaran pilkada ke September 2024 juga bisa mencegah seluruh wilayah Indonesia dipimpin oleh pejabat gubernur, bupati, dan wali kota. Kepemimpinan pejabat di seluruh wilayah Tanah Air dikhawatirkan kurang efektif karena kewenangan mereka tidak sebesar kepala daerah definitif.

Sebagai catatan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menyebabkan kekosongan kursi kepala daerah. Pada 2022, terdapat 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya, lalu posisi mereka digantikan oleh pejabat hingga kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024 dilantik.

Pada 2023, total terdapat 173 daerah yang akan dipimpin pejabat. Pada Desember 2023, terdapat 270 kepala daerah yang habis masa jabatan.

Tito menjelaskan, apabila hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 digelar sesuai rencana awal, yakni 27 November 2024, maka ada potensi kepala daerah terpilih baru bisa dilantik pada sekitar Februari 2025. Sebab, rata-rata jarak antara hari pencoblosan dan pelantikan sekitar tiga bulan, karena ada sengketa hasil serta proses penetapan oleh KPU.

Ketika kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024 baru dilantik pada Februari 2025, tentu harus ada 270 pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan yang terjadi sejak mereka habis masa jabatan pada Desember 2024. “Risikonya kan pada 1 Januari 2025 harus diisi pejabat,” ujarnya.

Saat 270 daerah dipimpin oleh pejabat pada 1 Januari 2025, hal itu berarti hampir semua daerah di Indonesia dipimpin oleh pejabat sementara. Tito mengatakan, hal itu bisa dicegah apabila hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024 dimajukan ke September karena kepala daerah terpilih diperkirakan sudah bisa dilantik pada 1 Januari 2025.

•RDO



“Kami sudah mengantongi nama-nama calon dan sudah pasti itu salah satunya dari kader kita,” terangnya.

Suharto



ROHIDIN MERSYAH TOLAK NYALEG DEMI CAGUB

Peta politik jelang Pemilihan Gubernur Bengkulu 2024 menjadi semakin ramai dengan munculnya sejumlah tokoh yang mendeklarasikan pencalonan mereka. Namun, yang masih menggantung adalah kelanjutan karir politik sang petahana, Rohidin Mersyah.

Diketahui Rohidin Mersyah masih mempunyai peluang untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Bengkulu pada 2024. Hal ini dikarenakan masa jabatannya sebagai gubernur Bengkulu definitif pada periode 2016-2021 kurang dari 2 tahun 6 bulan, sehingga dihitung sebagai satu periode.

Juru Bicara Rohidin Mersyah, Zulkarnain Kaka Jodho, mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi mengenai rencana kelanjutan karir politik Rohidin Mersyah.

Zulkarnain menegaskan, saat ini, Rohidin masih sepenuhnya fokus pada penyelesaian masalah-masalah dan pembangunan Bengkulu.

“Sampai sekarang Pak Gubernur belum mempertimbangkan untuk maju kembali. Beliau masih berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan melanjutkan pembangunan Bengkulu yang masih tersisa hingga akhir tahun ini,” ungkapnya belum lama ini.

Di sisi lain, Rohidin Mersyah telah menyatakan tidak ingin melirik Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Saat ini, dia masih fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan daerah.

“Saya kalau Pileg sudah dipastikan enggak, kalau pilkada, jawaban politik saya masih lihat situasi. Karena bagi saya, pimpinan di daerah itu potensi orang lain juga banyak,” kata Rohidin.

Saat dikonfirmasi mengenai rencananya untuk kembali maju di Pilgub 2024, Rohidin enggan berkomentar banyak. Namun, satu hal yang dipastikan oleh politisi Golkar ini adalah dirinya tidak akan maju sebagai calon anggota legislative (caleg).

“Jawaban politik saya masih lihat sit-

uasi nanti. Saya juga sudah mencoba menduduki jabatan gubernur dan menunjukkan karya dan kemampuan saya sudah terukur. Nanti saya akan lihat, kalau Pileg sudah pasti tidak,” jelas dia.

Tidak hanya itu, Rohidin Mersyah menyoroti potensi kerja sama antara partai politik dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mungkin akan berlanjut ke Pilkada Serentak 2024.

Kemungkinan adanya kolaborasi antara Rohidin dan Helmi dalam konteks ini tampaknya dapat terjadi setelah DPP Golkar dan PAN secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Menurut Rohidin Mersyah, peluang ini sangat besar, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Bahkan, peluang ini tetap besar, bahkan untuk partai-partai yang belum berkoalisi, terutama jika mereka sudah bersatu dalam DPP.

“Oh sangat besar, besar kemungkinan (Golkar Bengkulu bergabung dengan parpol di KKIR) pada pemilihan kepala daerah, bahkan dengan yang belum berkoalisi pun untuk bersatu itu sama besarnya juga, apalagi sudah berkoalisi di DPP,” kata Rohidin Mersyah.

Dia juga menegaskan, komunikasi yang lebih baik antara partai politik dalam koalisi tersebut akan menjadi potensi besar ketika mereka melanjutkan kerja sama dalam Pilkada. Termasuk kemungkinan Golkar bermitra dengan PAN dalam Pilkada Bengkulu 2024.

“Semua kemungkinan itu dapat terjadi. Di dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin, tinggal tergantung situasi terakhir dan formulasi yang terbaik,” kata dia.

Saat ini, Rohidin Mersyah menjabat sebagai Gubernur

Bengkulu dan kemungkinan besar akan menjadi pasangan Helmi Hasan, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode pada Pilgub Bengkulu 2024.

Rohidin menyatakan, semua kemungkinan ini bisa terjadi dalam politik, dan keputusan akhir akan bergantung pada situasi terakhir dan formulasi terbaik yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa Rohidin Mersyah dan Helmi Hasan sebelumnya bersaing dalam Pemilihan Gubernur Bengkulu pada 2020. Saat itu, Rohidin berpasangan dengan Rosjonsyah, sementara Helmi Hasan berpasangan dengan almarhum Muslihan DS.

Sementara, Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, belum memutuskan apakah dia akan mencalonkan diri dalam Pilgub Bengkulu 2024 atau tidak. Meski begitu, Helmi menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilgub Bengkulu jika masyarakat memilihnya sebagai kandidat.

Mengenai kemungkinan pencalonannya sebagai gubernur, Helmi mengisyaratkan bersedia bertarung dalam kontestasi tersebut dengan syarat bahwa ada permintaan dan dukungan kuat dari masyarakat.

“Keputusan untuk ikut atau tidak dalam Pilgub mendatang bergantung pada keinginan masyarakat. Jika masyarakat meminta dan mencalonkan, saya akan siap,” ujarnya.

Helmi menjelaskan, dalam Pemilu ini, PAN berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat Bengkulu.

Salah satu komitmen tersebut adalah memastikan perbaikan

jalan-jalan di Bengkulu, sehingga tidak ada lagi jalan rusak seperti kubangan kerbau. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menyediakan layanan ambulance gratis dan memberikan bantuan kepada anak-anak yatim.

“Saya memberikan satu syarat kepada masyarakat Bengkulu jika mereka ingin melihat saya maju sebagai calon gubernur pada Pilgub 2024 nanti. Salah satunya adalah PAN harus meraih kemenangan dalam Pemilu 2024 dan memperoleh setidaknya 7 kursi serta memimpin di DPRD,” jelas Helmi.

Sementara itu, Partai Gerindra juga sudah menyiapkan nama calon gubernur Bengkulu meskipun Pilkada baru akan digelar pada 27 November 2024.

Ketua DPD Partai Gerindra Bengkulu, Suharto, mengatakan, sama seperti partai politik lainnya, pihaknya sebenarnya belum mengambil sikap untuk Pilgub Bengkulu 2024. Namun, Partai Gerindra telah mengatur sejumlah strategi berkaitan dengan Pilgub yang akan diselenggarakan setelah pemilu dan pilpres berlangsung.

Secara gamblang, Suharto mengatakan, strategi itu belum dapat disampaikan ke publik. “Untuk Pilgub kita bicarakan setelah Pileg dan Pilpres dulu. Setelah Pilpres dan Prabowo jadi presiden, maka kita akan lakukan starteginya,” ujarnya.

Dia juga tak menampik sudah ada nama-nama yang dikantongi Partai Gerindra untuk menghadapi Pilgub Bengkulu 2024. Nama-nama itu juga berasal dari kader-kader terbaik Partai Gerindra yang dimiliki saat ini.

“Kami sudah mengantongi nama-nama calon dan sudah pasti itu salah satunya dari kader kita,” terangnya.

Senada dengan Suharto, Ketua DPW Partai Nasdem Bengkulu, Fery Ramli, mengatakan, pihaknya masih fokus untuk menghadapi Pileg 2024. Apalagi, pihaknya akan menargetkan 7 kursi di DPRD.

“Masalah pilkada kita belum terpikir sejauh itu dan kita juga belum menerima arahan dari DPP Partai Nasdem. Tentunya kami fokus bagaimana caranya Partai Nasdem bisa mewakili Bengkulu untuk duduk di DPR, sehingga ke depan bisa ada perwakilan dari Bengkulu,” kata Fery. ● IRY





“Jika Partai Golkar dapat mengusung kader sendiri dan meraih kemenangan dalam Pileg 2024 nanti, tentu kami berharap dapat mendukung kader-kader kami”

Ikhsan

SYAMSUAR-WARDAN DITANTANG TOKOH BESAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mencuatkan nama Gubernur Riau Syamsuar sebagai petahana yang secara tegas diusung oleh Partai Golkar Riau dan akan berpasangan dengan Wardan.

Namun, ada beberapa tokoh yang juga diusung untuk maju dalam Pilkada Riau 2024 dan menjadi lawan Syamsuar. Mereka di antaranya Agung Nugroho, Achmad, M Nasir, dan Bupati Bengkalis, Kasmarni.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Riau Bidang Pemenangan Pemilu, Ikhsan, menjelaskan, usulan ini diajukan dengan asumsi partai beringin dapat mengusung kader sendiri dalam Pilkada 2024 karena memiliki 14 kursi di DPRD Riau.

“Jika Partai Golkar dapat mengusung kader sendiri dan meraih kemenangan dalam Pileg 2024 nanti, tentu kami berharap dapat mendukung kader-kader kami. Saat ini, kami fokus pada persiapan untuk Pileg 2024,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, usulan ini juga merupakan respons terhadap dorongan

dan masukan dari kader-kader di bawahnya, terutama terkait dengan kemungkinan menggandeng Syamsuar dengan kader Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, Wardan diusulkan sebagai calon wakil gubernur.

“Usulan yang kami ajukan masih dalam tahap survei dan identifikasi terhadap kader-kader Golkar yang memiliki potensi untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah di masa mendatang,” tambahanya.

Meskipun Partai Golkar telah mencalonkan Syamsuar dan Wardan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau pada Pilkada 2024, ada satu nama kader yang tidak boleh diabaikan, yaitu Septina Primawati Rusli.

Septina Primawati Rusli adalah istri dari mantan politisi Partai Golkar dan mantan Gubernur Riau selama dua periode, Rusli Zainal. Perempuan ini juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Riau.

Pengamat komunikasi politik, Aidil Haris, menyebut, Septina Primawati Rusli tidak boleh dilewatkan dalam Pilkada 2024. Meskipun Partai Golkar Riau terus mengusung Syamsuar menduduki jabatan tersebut untuk periode kedua.

“Saya melihat Golkar kehilangan banyak tokoh, namun saat ini, jika ingin bersaing, Septina adalah kandidat yang paling berpotensi,” ujar Aidil.

Septina, anak dari

tokoh Riau, Ismail Suko, dianggap layak untuk dipertimbangkan, bukan hanya karena hubungannya dengan suaminya, Rusli Zainal, tetapi juga karena dia telah menarik perhatian Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal, untuk menjadi pasangannya dalam Pilgub Riau tahun depan.

“Ini sangat menarik, terutama ketika ada minat dari Syamsurizal. Semua bisa terjadi, tidak bisa diabaikan,” tambah Aidil.

Meski demikian, Aidil juga mengatakan bahwa Septina Primawati Rusli mungkin tidak akan dipilih oleh Partai Golkar sebagai calon gubernur, tetapi dia berpotensi untuk pindah ke partai lain.

“Namun, tidak menutup kemungkinan jika dia berhasil nanti, dia akan kembali ke Partai Golkar,” katanya.

Sedangkan, Partai Demokrat ikut mengambil langkah pencalonan kader dalam posisi gubernur Riau 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Agung Nugroho, menyatakan optimisme partai berlambang mercy dalam persiapan untuk berkompetisi dan memenangkan Pilgub Riau 2024.

“Insya Allah, Demokrat Riau akan mengusung kader internal untuk Pemilihan Gubernur Riau 2024,” ujar Agung.

Dalam survei internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat, terdapat tiga nama kader yang masuk dalam pertimbangan untuk diusung sebagai calon gubernur. Ketiga kandidat tersebut adalah Agung Nugroho, Achmad, dan M Nasir.

Agung menjelaskan, saat ini partai sedang mengevaluasi potensi dari masing-masing kandidat sebelum mereka membuat keputusan akhir.

“Ada tiga nama yang masuk

dalam survei pemilihan gubernur, yaitu saya sendiri, Agung Nugroho, Achmad, mantan Bupati Rokan Hulu yang juga anggota DPR, dan M Nasir yang juga anggota DPR. Semua memiliki potensi yang baik,” ungkap Agung.

Keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusung oleh Partai Demokrat Riau akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat.

“Nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum dengan salah satu faktor pertimbangan adalah hasil survei internal,” tambah Agung.

Selain keempat tokoh yang disebutkan sebelumnya, saat ini nama Bupati Bengkalis, Kasmarni, juga tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sebagai kandidat potensial yang dapat diusung dalam Pilgub Riau 2024.

Seniman, budayawan, dan politisi senior Riau, Akhmad RM, mengungkapkan, Kasmarni merupakan kandidat yang pantas dipertimbangkan dan memiliki potensi untuk menjadi calon gubernur Riau.

“Selama kepemimpinannya di Bengkalis, dia telah berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik, tidak menimbulkan masalah atau gejolak seperti yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya,” ujar Akhmad.

Mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Riau (DKR) ini juga menyarankan, agar Kasmarni mencari calon wakil gubernur dari daerah Riau daratan, seperti Indragiri, Pekanbaru, Kampar, dan wilayah lainnya.

“Sebagai saran dari saya, wakil gubernur yang dapat dipertimbangkan berasal dari daerah Riau daratan, seperti Indragiri Hilir atau Kampar, yang memiliki dukungan pemilih terbanyak kedua dan ketiga di Provinsi Riau,” tambah Eddy. •IRY



“Kalau terkait peluang maju bisa apa tidak, itu kehendak Allah dan kami hanya menjalankan”

Akbar Alfaro



PENGGANTI HARNOJOYO BEREBUT POPULARITAS

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, akan segera mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin selama satu dekade. Setahun jelang Pemilihan Wali Kota Palembang, sejumlah nama potensial muncul sebagai calon pengganti Harnojoyo.

Beberapa nama memiliki peluang besar untuk maju sebagai calon wali kota Palembang. Mereka di antaranya Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda; Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa; Mantan Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar; Kepala Dinas PU Perkim Sumsel, Basyaruddin Ahmad; serta Charma Afrianto dan Akbar Alfaro. Keenam kandidat calon wali kota Palembang ini memiliki elektabilitas yang semakin tinggi. Tapi siapa yang paling kuat untuk menggantikan posisi Harnojoyo?

Meskipun belum secara resmi mengumumkan pencalonannya, Fitrianti Agustinda atau yang akrab dipanggil Finda dipercaya akan ikut dalam Pilwako Palembang 2024.

Jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Palembang saat ini dianggap strategis untuk melanjutkan kepemimpinan Harnojoyo. Selain itu, Finda juga menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Kota Palembang, sehingga memiliki modal sebagai ketua partai untuk mencalonkan diri. Dia terlihat aktif dalam menjalankan tugas pemerintahan dan berinteraksi dengan masyarakat Palembang secara rutin.

“Doakan saja yang terbaik. Jika memang masyarakat Palembang menginginkan saya untuk maju dan mengemban tanggung jawab yang lebih besar sebagai wali kota, tentu ini adalah amanah yang harus saya jalankan,” ungkapnya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Politika Institute yang berjudul “Preferensi Pemilihan Calon Wali Kota Palembang 2024” menempatkan nama Fitrianti Agustinda sebagai yang paling populer dengan tingkat popularitas mencapai 91 persen dan tingkat akseptabilitas sebesar 86 persen.

“Tidak ada manusia yang sempurna,” sambungnya.

Finda berjanji jika diberi kesempatan untuk menjadi Wali Kota Palembang di masa depan, ia akan menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik. Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang saat ini tengah ditekuninya, termasuk program kesehatan untuk menurunkan angka stunting dari 1.000 menjadi 490.

“Saya akan menjalankan tugas apapun yang diamanahkan dengan baik, termasuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nanti akan tetap mendapatkan dukungan kami untuk kemajuan Kota Palembang,” tegasnya.

Di sisi lain, Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Palembang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Palembang. Hasil survei

menunjukkan, Ratu Dewa memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon wali kota. Namun, Dewa masih fokus pada tugasnya sebagai Sekda.

Meski begitu, Ratu Dewa belum mengakui secara terang-terangan bakal maju Pilkada Palembang.

“Saat ini kita masih memilih untuk fokus bekerja,” ulasnya.

Sementara, mantan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, telah secara terbuka menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilwako Palembang. Spanduk kampanyenya bahkan sudah tersebar luas di Kota Palembang.

Pengalaman Nasrun sebagai Sekda Sumsel dan Penjabat Bupati Muara Enim dianggap sebagai modal yang cukup untuk bersaing dengan calon lainnya dalam Pilwako Palembang.

“Saya selalu hidup dalam keoptimisan yang tinggi, tapi tetap bertawadhu kepada Allah SWT,” kata Nasrun Umar.

Calon kuat lainnya ada Basyaruddin Ahmad yang kini menjabat Kepala Dinas PU Perkim Sumsel.

Namanya bahkan sudah muncul dalam survei sebagai calon wali kota Palembang. Dia telah melakukan kampanye dengan memasang spanduk di berbagai sudut Kota Palembang.

Basyaruddin menegaskan pentingnya tindakan nyata dalam bekerja daripada sekadar kata-kata. Dia menyatakan rencana-rencana yang dibuat harus diwujudkan secara konkret.

Sebagai contoh, jika ia berbicara tentang Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat, maka hal tersebut harus benar-benar direalisasikan. Selain itu, stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring juga harus menjadi kenyataan, bukan hanya berupa wacana.

“Kemenangan dalam kontestasi politik ini akan tergantung pada strategi yang tepat, bukan hanya berdasarkan jumlah massa pendukung,” jelasnya.

Visi dan misi Basyaruddin adalah menjadikan Palembang sebagai kota yang maju, modern, dan bermartabat. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh paguyuban, serta individu yang pernah berperan dalam pembangunan Kota Palembang.

Selanjutnya, Charma Afrianto telah menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilwako Palembang dan telah mengusulkan sejumlah program, seperti sekolah dan berobat gratis, serta peningkatan warung rumah di Kota Palembang.

“Saya akan mewujudkan program-program bukan hanya slogan,” tegasnya.

Charma mengaku tujuannya mencalonkan diri menjadi wali Kota Palembang tidak berharap kekuasaan, melainkan untuk sosial.

“Perubahan total Kota Palembang,” kata dia.

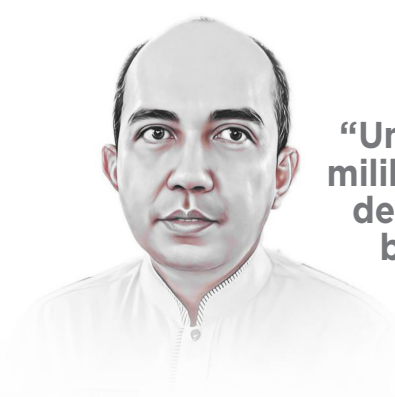
Nama yang juga populer adalah anggota DPRD Palembang, Akbar Alfaro, yang tampaknya juga akan maju kembali dalam Pilkada Palembang.

“Kalau terkait peluang maju bisa apa tidak, itu kehendak Allah dan kami hanya menjalankan. Kalaupun Allah menghendaki, saya harus realistis dengan keadaan saat ini. Namun, kami yakin dan optimis segala kemungkinan bisa terjadi,” katanya.

Sesuai taglinenya “Perubahan untuk Palembang”, Akbar Alfaro menyampaikan konsep 3M.

“Sesuai aspirasi masyarakat yang ingin ada perubahan yang lebih baik untuk Kota Palembang. Konsennya pada 3M, Memperbaiki, Menambah, Meningkatkan,” pungkasnya. •IRY





“Untuk masa depan, saya memilih menjadi gubernur karena dengan posisi itu, saya dapat berbuat lebih banyak untuk Bangka Belitung”

Maulan Aklil

INFO PILKADA

Minggu II • September 2023

11

HIDAYAT ARSANI PEDE KALAHKAN ERZALDI ROSMAN

Sejumlah tokoh kini mulai bermunculan sebagai kandidat bakal calon gubernur Bangka Belitung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka yang namanya mencuat juga bukanlah individu sembarangan.

Beberapa nama yang telah mencuat dan menjadi sorotan adalah mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman; Mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani; dan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen.

Namun, dalam merespons isu-isu seputar pencalonannya sebagai gubernur pada 2024, Erzaldi Rosman yang saat ini menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Bangka Belitung mengaku bahwa saat ini fokusnya adalah pada Pilpres 2024.

“Gerindra Babel memfokuskan kemenangan Pak Prabowo sebagai Presiden 2024. Untuk calon kepala daerah belum menjadi perhatian. Bagi kami, yang lebih penting saat ini adalah kemenangan Pak Prabowo sebagai Presiden,”

ungkap Erzaldi.

Sebelumnya, Erzaldi merasa perlu maju lagi sebagai calon gubernur pada 2024 karena masih ada banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, dia menegaskan keputusan akhir untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2024 akan bergantung pada keputusan partai.

Erzaldi menjelaskan, keinginannya untuk maju sebagai gubernur Bangka Belitung pada 2024 adalah agar dia dapat menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang masih perlu dilakukan hingga saat ini.

Sementara, mantan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, secara terang-terangan telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur pada 2024.

Hidayat Arsani bahkan mengungkapkan bahwa ia telah memiliki enam nama kandidat calon wakil gubernur yang akan mendampingi dalam Pilgub 2024. Namun, nama-nama kandidat tersebut masih dijaga kerahasiaannya.

“Komunikasi dan penjajakan terus dilakukan, sejauh ini sudah ada enam nama calon yang sudah dikantongi, cuma masih kita rahasiakan. Kalau komunikasi sudah ke empat parpol,” kata Hidayat.

Hidayat juga memberikan pandangannya mengenai potensi kandidat lain yang mungkin akan maju dalam Pilgub 2024. Ia mengakui bahwa mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, juga diyakini masih berkeinginan untuk ikut dalam kontestasi tersebut.

Hidayat Arsani berpendapat bahwa hingga saat ini belum ada figur yang dapat menandingi elektabilitas Erzaldi Rosman, kecuali dirinya sendiri.

Hidayat Arsani bahkan berani mengklaim bahwa ia tidak akan maju dalam Pilgub jika ada kandidat lain yang memiliki elektabilitas sebanding dengan Erzaldi.

Namun, jika Erzaldi Rosman memutuskan untuk maju, Hidayat tetap akan meneruskan niatnya untuk mencalonkan diri.

“Tapi kalau memang ada figur yang elektabilitasnya bisa sejajar dengan Erzaldi, saya tidak akan nyalon, biarlah saya kembali menjadi pengusaha dan tukang kebun saja. Cuma kalau dia maju, saya tetap maju juga,” tegas Hidayat.

Nama lain yang juga mencuat sebagai calon gubernur Bangka

Belitung 2024 adalah Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil alias Molen.

Molen merasa tertantang oleh banyaknya isu dan berita viral yang beredar di media sosial mengenai dirinya dan sang istri. Isu-isu ini sempat melibatkannya hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski kasusnya telah dinyatakan selesai dan tidak ada permasalahan yang ditemukan, hasil penyelidikan KPK menunjukkan tidak adanya kejanggalan terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh Molen.

Semua aset dan harta miliknya telah dilaporkan dengan baik, bahkan sebelum ia menjabat sebagai wali kota.

“Soal gubernur sebetulnya jauh hari enggak minat, namun dengan kejadian ini, ada semacam istilah bangun macan tidur ‘lo tantang gue lawan’,” ungkapnya.

Meskipun saat ini belum ada perintah atau panggilan resmi dari pihak partai politik, Molen tidak menutup kemungkinan untuk maju sebagai calon gubernur.

“Belum ada perintah. Sebagai kader partai, saya siap untuk menjalankan perintah partai. Tapi ada beberapa isyarat yang mulai muncul, karena selama ini belum ada calon gubernur dari partai kami,” jelasnya.

Molen menyatakan bahwa motivasinya untuk maju dalam Pilgub 2024 adalah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masa depan Bangka Belitung.

“Untuk masa depan, saya memilih menjadi gubernur karena dengan posisi itu, saya dapat berbuat lebih banyak untuk Bangka Belitung,” tambahnya.

Bangka Belitung, kata dia, memiliki potensi luar biasa, asalkan dikelola dengan baik oleh pemimpin yang memiliki inovasi dan visi yang kuat.

“Seorang gubernur harus memiliki jiwa visioner dan tidak hanya menjadi pengikut. Mereka harus berani mengambil keputusan dan merancang perubahan, meskipun tahu bahwa perubahan tersebut mungkin akan menuai kontroversi,” jelasnya.

Dosen Ilmu Politik di Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain, mengatakan, dalam melihat seorang Molen, ada pertimbangan yang sangat penting yaitu modal moral.

Dia menegaskan, peluang seorang Molen menjadi lebih besar jika mempertimbangkan dinamika politik saat ini. Namun, pada akhirnya, ambisi politik dan peluang yang tersedia akan menjadi faktor penentu apakah seorang Molen akan maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung.

“Peluang Molen menjadi sangat besar jika melihat dinamika politik saat ini,” pungkasnya. ●IRY





PENJABAT GUBERNUR SARAT KEPENTINGAN POLITIK

Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2023 telah menunjuk sepuluh penjabat gubernur melalui sidang tim penilai akhir (TPA). Sembilan penjabat gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023.

Sementara, satu penjabat gubernur lainnya baru akan dilantik pada 19 September 2023. Para penjabat gubernur itu akan menjabat paling lama setahun dan bisa diperpanjang hingga terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Kesembilan penjabat gubernur yang sudah dilantik adalah Mayor Jenderal (Purn) Hasanuddin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Hasanuddin adalah mantan Pangdam Bukit Barisan periode 2021-2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat.

Selain itu, ada Bey Triadi Machmudin, yang menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Bey sebelumnya menjabat sebagai Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Ada pula Komisariss Jenderal (Purn) Nana Sudjana sebagai Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Nana merupakan mantan Kapolda Metro Jaya. Lulusan Akpol 1998 itu juga pernah bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Adapun, Penjabat Gubernur Bali, Inspektur Jenderal (Purn) Sang Made Mahendra, merupakan purnawirawan Polri yang juga pernah menjabat sebagai staf khusus Mendagri. Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Komisariss Jenderal (Purn) Andap Budhi Revianto, juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Tenggara yang sejak Maret 2021 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiga penjabat lainnya yang berasal dari birokrat sipil adalah Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhia Kalake, yang sejak 2022 menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, ada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Lalu, Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, yang menjabat Sekretaris Daerah Papua.

Sementara, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Gita Ariadi, baru akan dilantik pada 19 September 2023. Sebab, masa jabatan Gubernur NTB Zulk-



iefflimansyah berakhir pada tanggal tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pelantikan sembilan penjabat gubernur telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi yang berlatar belakang purnawirawan TNI/Polri.

“Ada empat yang latar belakangnya dari TNI dan Polri, tapi mereka sudah pensiun. SK pemberhentiannya juga ada, semua lengkap administrasinya, jadi kita mengacu pada aturan hukum yang berlaku,” kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, keempat nama purnawirawan TNI/Polri tersebut sebelumnya telah beralih menjadi aparatur sipil negara di sejumlah kementerian/lembaga. “Tadi, yang empat tadi semuanya sudah purnawirawan, dan tidak dilarang mereka untuk menjadi aparatur sipil negara. Setelah mereka menjabat aparatur sipil negara, Eselon I struktural misalnya, staf ahli menteri itu adalah eselon I struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi penjabat gubernur,” jelas mendagri.

Mendagri menjelaskan, UU 10/2016 tentang Pilkada sudah mengatur tentang pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut. Dalam UU Pilkada itu disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

“Kami memahami semangat daripada reformasi, demokratisasi, yang berorientasi penekanan kepada civilization, yaitu mensipilkan, pemerintahan sipil ya. Maka, kalau dari TNI dan Polri ingin menjadi penjabat, mereka harus berada pada posisi sudah purnawirawan, pensiun, setelah itu boleh masuk ke instansi sipil,” terangnya.

Mendagri juga meminta sembilan penjabat gubernur yang baru dilantik bersikap netral. Mendagri melarang penjabat guber-

nur yang merupakan ASN terlibat dalam politik praktis.

“Tapi (terlibatlah dalam) politik negara untuk membangun daerah masing-masing, itu menjadi beban yang terpenting,” tegas Mendagri.

Mendagri mengatakan, tujuan adanya penjabat kepala daerah adalah mengisi kekosongan agar roda pemerintahan di daerah yang bersangkutan tetap berjalan. Kinerja penjabat kepala daerah bakal diawasi oleh banyak pihak. Kemendagri juga secara rutin mengevaluasi kinerja mereka.

Dia menegaskan, pihaknya tak segan-segan memberikan sanksi kepada penjabat kepala daerah yang terbukti tidak netral. Mendagri juga berpesan kepada para penjabat gubernur agar memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh negara, terutama presiden, dengan baik.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, mengatakan, jika melihat latar belakang para penjabat kepala daerah itu, sulit untuk tidak melepaskan kesan mereka dekat dengan kekuasaan. Baik itu kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, tokoh politik nasional, maupun tokoh partai politik tertentu. Asumsi itu karena masyarakat sulit melihat secara obyektif latar belakang kepakaran yang dimiliki para penjabat kepala daerah tersebut.

Jika ingin obyektif, kata Djohermansyah, idealnya penjabat gubernur harus memiliki kemampuan manajerial, kompetensi teknik, kompetensi sosial-kultural, dan kompetensi politik pemerintahan. Karena penunjukan penjabat juga dilakukan tidak secara transparan, terbuka, dan demokratis, akhirnya publik merasa tidak bisa memberikan masukan mengenai integritas calon. Calon-calon yang terpilih melalui mekanisme Tim

Penilai Akhir (TPA) di Kementerian Sekretariat Negara juga tidak bisa dipastikan usulan dari mana.

“Kalau tidak bisa diukur dengan kriteria obyektif, wajar jika publik menilai sembilan nama itu dekat dengan Presiden, tokoh parpol, dan nasional karena memang publik juga tidak tahu alasan latar belakang kemampuan dan integritasnya seperti apa,” kata Djohermansyah.

Djohermansyah khawatir, jika penjabat gubernur tetap tidak dipilih berdasarkan sistem merit, justru pelayanan publik di daerah akan menurun. Sebab, para penjabat ini ibaratnya akan mengurus penyelenggaraan publik, mulai dari bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.

Mereka akan berkecimpung menangani 32 urusan pemerintahan, mulai dari kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, investasi, dan sebagainya. Apalagi, mereka ditempatkan di provinsi-provinsi strategis, di mana harus ada percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang baik.

“Belum lagi soal netralitas mereka saat berhadapan dengan kepentingan politik, baik pemilu legislatif, maupun pemilu presiden. Kedekatan-kedekatan dengan tokoh nasional menjadi tidak elok. Perlu dibangun sistem yang tegas apabila terlihat tidak netral mereka bisa dicopot setelah evaluasi tiga bulan,” tegasnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, memandang persyaratan penjabat kepala daerah tidak begitu ketat karena hanya mensyaratkan jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya atau eselon I untuk penjabat gubernur, dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II untuk penjabat bupati atau wali kota. ●RDO



“Jika nanti ada suara penyangdang disabilitas di Kabupaten Muba tidak terakomodir di Pemilu 2024, PPDl Muba akan menggugat penyelenggara pemilu karena itu juga masuk kasus pidana”

Hafiz Alfangky

SUARA PENYANDANG DISABILITAS JANGAN SAMPAI HILANG

Pesta demokrasi lima tahunan yang akan dilaksanakan pada 2024 adalah hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Mereka harus diberikan perlakuan khusus agar dapat menyalurkan suaranya memilih pemimpin bangsa ke depan.

Namun, ada banyak kendala yang dialami para penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sarana dan prasarana yang tidak menunjang membuat para penyandang disabilitas terpaksa merelakan hak suaranya untuk memilih calon presiden, calon anggota legislatif, hingga calon kepala daerah pilihannya.

Di Sumatera Selatan, banyak penyandang disabilitas yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bisa mendapatkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan data KPU Sumatera Selatan pada Pemilu 2019, penyandang disabilitas berjumlah 6.629 orang. Mereka yang menggunakan hak pilihnya terdiri dari 1.618 laki-laki dan 1.893 perempuan. Jika ditotal jumlahnya 3.511 orang atau 52,96 persen. Jumlah ini tentu akan bertambah di Pemilu 2024.

Pemilih penyandang disabilitas juga masuk dalam pengawasan Bawaslu karena dianggap rawan penyelewengan suara.

“Jadi setiap warga masyarakat Indonesia yang tidak diambil atau tidak

dicampur hak pilihnya oleh pengadilan, kita mempunyai hak yang sama. Dan nilainya pun sama. Jadi tidak ada perbedaan, misalnya sebagai seorang camat mempunyai nilai pemilihnya dua. Jadi, dalam hal ini kita sama. One man, one vote, one value. Satu orang, satu. Satu suara nilainya juga sama,” jelas anggota Bawaslu Sumsel, Massuryati.

Koordinator Divisi pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel ini mengatakan, ke depan untuk para penyandang disabilitas tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya ke panti asuhan disabilitas di Kota Prabumulih untuk mengumpulkan dan menjelaskan peran penting melakukan pemilihan.

Sosialisasi ini dilakukan agar jangan sampai masyarakat yang memiliki keterbatasan ini merasa tidak dipedulikan dan tidak dibutuhkan dalam proses pemilihan ini.

“Jadi, kami menghimbau pada masyarakat yang memiliki penyandang disabilitas, saudara-saudara kita itu untuk tetap berkontribusi dalam bentuk memilih pemimpin pada pemilihan yang akan datang. Jadi sangat penting peran-peran disabilitas ini kita gaet,” terang Massuryati.

Organisasi sosial Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Musi Banyuasin juga terus memperjuangkan hak pilih mereka agar kesempatan untuk mencoblos surat suara tidak hilang.

Humas dan Informasi PPDI Muba, Hafiz Alfangky, menuturkan, sejak Januari 2023, mereka sudah melakukan beberapa upaya untuk menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas. Seperti melakukan beberapa audiensi ke stakeholder terkait, mulai dari KPU, Bawaslu hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muba.

“Saat ini, data penyandang disabilitas di Muba yang tercatat di KPU sebanyak 1.423 orang berdasarkan data lama dan sudah diinput dengan kategori tunagrahita,

tunanetra dan tunadaksa. Kami juga sudah beberapa kali mendesak penyelenggara pemilu untuk menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas di TPS. Kami minta disiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Belajar dari Pemilu 2019, kata dia, sarana dan prasarana masih sangat jauh dari kata layak dan belum dipersiapkan secara matang untuk para penyandang disabilitas saat pencoblosan. Di antaranya akses kursi roda, tongkat, alat bantu untuk tunanetra dan lainnya. PPDI Muba berharap tidak ada lagi penyandang disabilitas yang tidak terakomodir untuk mencoblos surat suara.

Saat ini, ada sekitar 1.600 orang penyandang disabilitas yang terdata di PPDI Muba. Namun baru sekitar 1.100 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan hak pilih, sisanya masih di bawah umur.

“Jika nanti ada suara penyandang disabilitas di Kabupaten Muba tidak terakomodir di Pemilu 2024, PPDI Muba akan menggugat penyelenggara pemilu karena itu juga masuk kasus pidana,” ungkapnya.

Langkah yang sama dilakukan Sentra Budi Perkasa Palembang, tempat bernaungnya para penyandang disabilitas Sumsel di bawah Kementerian Sosial.

Kepala Tata Usaha Sentra Budi Perkasa, Wahyu Hendro Darmanto, menjelaskan, penyelenggara pemilu sudah melakukan sosialisasi terkait proses pencoblosan surat suara di Pemilu 2024.

“Penyandang disabilitas di sini adalah disabilitas fisik dan tunanetra. Dari penyelenggara pemilu sudah akan memfasilitasi, termasuk pendampingan khusus bagi tuna netra. Walaupun tidak ada pencoblosan di sini, tapi akan disiapkan sarana prasarana bagi para penyandang disabilitas di sini untuk mencoblos di daerahnya. Penerima manfaat di sini berasal dari beberapa daerah di Sumsel, Kota Padang Sumbang dan Kabupaten Batang Hari Jambi,” ujarnya.

Mereka juga terus mengedukasi penerima manfaat di Sentra Budi Perkasa Palembang agar memanfaatkan

kan hak suaranya untuk memilih di Pemilu 2024. Namun, jika berasal di daerah yang jauh dan tidak bisa pulang ke daerahnya, penerima manfaat tidak bisa berkontribusi dalam memilih calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Namun, untuk Pilpres 2024 bisa dilakukan oleh penerima manfaat di Sentra Budi Perkasa Palembang karena sosok capres sudah dikenal dan bukan mewakili daerah tertentu.

“Kalau caleg dan cakada kan dipilih berdasarkan daerahnya dan harus dipilih di TPS di tempat masing-masing. Penerima manfaat akan kesulitan kalau harus pulang dulu ke kampungnya. Tapi kalau capres, bisa memilih di mana saja, tergantung dari TPS mana yang ditunjuk penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Kader Partai Golkar yang mencalonkan diri sebagai caleg di Dapil Sumsel 3, Suardi, menekankan, jika penyelenggara pemilu memang harus fokus juga pada kebutuhan para penyandang disabilitas.

Pria yang akan bertarung di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir ini mengaku merasa dirugikan jika hak-hak suara penyandang disabilitas di dapilnya tidak bisa mencoblos surat suara. Sebab, bisa jadi salah satu penyandang disabilitas adalah pendukungnya.

“Itu merugikan kami, karena satu suara saja sangat bermanfaat untuk kami. Makanya kita terus memantau bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu agar bisa memfasilitasi semua pemilih. Apalagi di dapil saya, ada banyak penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan hak suara di Pemilu 2024,” ujarnya.

Namun, dia percaya penyelenggara Pemilu 2024 bisa mengakomodir dengan baik kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. ●RDR





PRABOWO MASIH UNGGUL DI SUMSEL

Keluarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak menyurutkan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, hal itu makin menguatkan posisi Prabowo Subianto dan para relawannya untuk lebih maksimal mendukung calon presiden mereka.

Semangat kuat ini ditunjukkan Relawan Pro Prabowo Subianto (Propas) Sumatera Selatan yang siap mendukung penuh pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai Presiden Indonesia berikutnya.

“Kami yakin di Pilpres 2024 Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Bagi kami tidak ada pilihan lain karena beliaulah (Prabowo) sosok yang terbaik saat ini. Kami di Sumatera Selatan akan berjuang maksimal untuk kemenangan Prabowo Subianto,” tegas Bendahara Propas Sumsel, Fitriana.

Perempuan yang akrab disapa Pingky ini mengatakan, Propas adalah relawan mandiri yang ingin memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden atas dasar kecintaan dan karakternya. Sehingga atas kesamaan visi inilah, pengagum Prabowo Subianto bersatu membentuk Propas.

Sebagai relawan mandiri, Propas bukan berasal dari kalangan kader partai, tapi pengusaha, wiraswasta hingga ibu rumah tangga dan kader partai pendukung Prabowo Subianto.

“Jadi Propas ini adalah relawan dan sifatnya mandiri dan bukan dari partai. Bahkan sebelum saya berpolitik di Partai Bulan Bintang untuk

menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari Dapil Sumsel satu Palembang, saya sudah bergabung dengan Propas terlebih dahulu,” ungkap Pingky.

Untuk menjalankan misinya, mereka sangat serius yang dibuktikan dengan sudah membentuk 34 Propas di seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan, Propas sudah terbentuk di 17 kabupaten/kota.

“Jadi kami berkeyakinan pada Pemilu 2024 mendatang, sosok Prabowo Subianto akan memenangkan kontestasi pemilihan presiden, dan suara pemilihan untuk beliau akan tetap tinggi seperti pada Pemilu 2019, khususnya di Sumsel,” tegas kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Menurut Pingky, keluarnya PKB dari koalisi merupakan dinamika politik dan tidak menyurutkan kekuatan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sehingga dengan keyakinan penuh, Prabowo akan menjadi presiden berikutnya.

iden berikutnya.

“Bila ada tawaran untuk menjadi cawapres, kami tidak setuju karena sudah saatnya Prabowo Subianto jadi presiden. Soal siapa cawapresnya, kami tidak masalah karena pasti pilihan terbaik,” tegas wanita yang juga pengusaha ini.

Keyakinan Pingky semakin kuat kalau Propas bisa memenangkan Prabowo Subianto di Sumsel karena banyak kader partai pendukung juga ikut bergabung di lembaga relawan ini.

“Tentunya tujuan utama kami adalah untuk memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada seluruh relawan Propas di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Keyakinan sama disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Satuan Relawan Indonesia Raya Satria Gerindra, sayap Partai Gerindra Sumsel, Mohammad Zulkifli Yassin.

“Kami yakin akan mendapatkan suara jauh lebih baik daripada Pemilu sebelumnya. Seluruh struktur partai bergerak, kompak dan solid untuk memenangkan Pak Prabowo menuju RI-1,” ungkap Yassin.

Yassin menjelaskan, pada Pemilu 2019, suara Prabowo Sumsel di Sumsel mengalahkan pasangan Jokowi. Sehingga keunggulan ini akan mereka pertahankan, bahkan lebih meningkat lagi karena banyaknya relawan yang bergabung.

“Tentunya kami akan berusaha sekuat mungkin. Salah satu caranya adalah melakukan penggalangan dan pendekatan kembali kepada masyarakat. Kami yakin program-program yang ditawarkan Prabowo sangat menyentuh terhadap kepentingan masyarakat banyak, khususnya kalangan bawah,” ungkapnya.

Unggul di Sumsel

Prabowo Subianto masih bertengger di posisi pertama dalam survey elektabilitas di Sumatera Selatan. Elektabilitas mantan Danjen Kopassus tersebut unggul dari beberapa nama bakal calon presiden berikutnya.

iden yang diprediksi maju dalam pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024. Dua pesaing ketatnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, menempel di urutan kedua dan ketiga.

Berdasarkan temuan survei Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) yang digelar akhir Agustus 2023, pada pertanyaan terbuka (top of mind) posisi pertama di tempati oleh Prabowo Subianto dengan 28,3 persen, lalu Anies Baswedan 16,4 persen, dan Ganjar Pranowo 12,7 persen. Nama-nama bakal capres lainnya masih berada di bawah lima persen dan massa mengambang sekitar 36 persen.

Sementara, uji simulasi pertanyaan tertutup dengan tiga nama masih ditempati oleh Prabowo Subianto dengan 38,3 persen, Ganjar Pranowo 26 persen, dan Anies Baswedan 24,2 persen. Untuk massa mengambang atau massa yang belum menentukan pilihan 11,5 persen.

Direktur Eksekutif LKPI, Arianto, mengatakan, Prabowo Subianto masih cukup perkasa dan unggul dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun, secara statistik, ada tren dukungan yang menguat kepada Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, meskipun kenaikannya belum signifikan.

Ia menerangkan, kenaikan elektoral tiga nama bakal capres di Sumatera Selatan ini masih belum begitu besar. Prabowo Subianto yang di dukung partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Gelora elektabilitasnya belum bisa menembus angka lebih dari 50 persen.

Hal ini disebabkan akar rumput pemilihan partai-partai pendukung Prabowo Subianto itu secara mayoritas tidak serta merta menjatuhkan pilihannya kepada Menteri Pertahanan itu. Pemilihan partai pendukung Prabowo masih tersebar ke Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Demikian juga dengan tarikan elektoral Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Dukungan partai politik dari Anies Baswedan yang didukung Partai Nasdem, PKS dan PKB juga masih tersebar ke Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Hal yang sama dengan Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. Ternyata, pemilihan partai-partai tersebut masih tersebar juga di Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Indikasi ini menunjukkan, pertarungan figur bakal calon presiden sangat menentukan di masyarakat,” terangnya.

Ke depan, tentunya persaingan elektabilitas ini akan semakin sengit. Siapa yang akan unggul untuk merebut hati pemilih, khususnya di Sumatera Selatan. Peluang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih terbuka lebar untuk menempati posisi teratas karena dipastikan dengan adanya gejolak dukungan partai politik pada bakal calon presiden akan berdampak. **•RDR**





“Presiden terpilih nantinya harus berani menghentikan eksploitasi tambang batu bara itu, apalagi untuk kepentingan ekspor ke luar negeri”

Arlan

INFO
DAPIL

Minggu II • September 2023

15

PRESIDEN KEDELAPAN HARUS JAGA LINGKUNGAN

Pemilu 2024 menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berikutnya yang punya komitmen pada perbaikan lingkungan. Sebab, para pemimpin banyak yang mengumbar izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana alam.

Akibatnya, masyarakat yang teraniaya dengan kebijakan-kebijakan dari para pemimpin yang melegalisasi aksi-aksi perusakan lingkungan. Hal itu berpotensi membuat hajat hidup masyarakat menjadi terancam, baik hunian, sumber daya alam, hingga sumber perekonomian.

Ketiga calon presiden yang kini paling di Jagokan pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, tak luput dari rekam jejak dalam perusakan lingkungan. Namun di antara mereka, siapa yang paling besar pengaruhnya dalam mengembalikan lingkungan menjadi asri?

Aktivis lingkungan yang kini menjadi calon anggota legislatif (caleg) lewat Partai Nasdem, M Hairul Sobri, menuturkan, momentum Pilpres 2024 menjadi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebab, pengelolaan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan menjadi bagian yang sangat penting dalam visi misi capres. Apalagi, tiga orang capres saat ini merupakan pemimpin baru dalam menata negara ke depan, di tengah krisis iklim dan dihadapkan dengan situasi timpangnya pengelolaan sumber daya alam (SDA) antara rakyat dan korporasi.

“Tiga capres ini harus memberikan gagasan yang tegas terhadap penataan negara dengan membuat terobosan baru yang sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu,” katanya.

Dia berkata, hampir setiap kandidat capres memiliki rekam jejak yang buruk dalam penataan atau penyelesaian kasus lingkungan, yang juga atas campur tangan aktor-aktor yang memberikan dukungan pendanaan kampanye ke para kandidat.

Ganjar Pranowo yang diusung PDIP memiliki rekam jejak yang buruk dalam proses penyelamatan kawasan karst yang ekspansinya ke pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Publik sebenarnya bisa melihat bagaimana keberpihakan Ganjar Pranowo terhadap perusakan kawasan karst yang akan diekspansi lewat PT Semen Indonesia, dibandingkan mendorong penyelamatan lingkungan, terutama masyarakat yang terdampak.

Dengan rusaknya kawasan karst tersebut, otomatis kehidupan Masyarakat ikut rusak, mulai dari hilangnya pasokan air untuk kehidupan, pertanian, peternakan dan lainnya, yang menjadi sumber perekonomian masyarakat sekitar.

Kemudian, Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat melakukan upaya penolakan atas reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukannya saat baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tapi, saat jadi Gubernur DKI Jakarta, sempat terhenti, Anies Baswedan juga belum menghentikan proses pembangunan. Masalah pasca-Anies Baswedan tidak menjabat sebagai Gubernur Jakarta, pembangunan kembali dilanjutkan,” ujar Ketua DPD Garda Pemuda Nasdem OKU ini.

Lalu, Prabowo Subianto merupakan salah satu pengusaha di bidang industri ekstraktif yang terindikasi memiliki usaha tambang dan perkebunan yang luas. Pertambangan dan perkebunan menjadi bagian dari permasalahan lingkungan saat ini di Indonesia.

Jika salah satunya terpilih jadi presiden, dia berharap kawasan gambut dan pesisir yang kondisinya kritis bisa menjadi perhatian serius. Lahan gambut di Sumsel yang cukup luas jika dikelola dengan rakus akan mengakibatkan kepungan asap yang menjadi ancaman rakyat.

Dia juga berharap agar pemerintah ke depannya tidak memberi izin-izin industri ekstraktif, seperti tambang, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Serta mencabut izin-izin perusahaan yang telah terbukti melakukan kejahatan lingkungan dan tidak menambah izin baru.

Pria yang akrab disapa Eep ini berharap presiden berikutnya harus berani melakukan pencabutan izin, terutama grup perusahaan besar yang selama ini terkesan dilindungi. Presiden selanjutnya harus memiliki wibawa dan tidak tunduk terhadap korporasi besar yang rakus melakukan kejahatan lingkungan di Indonesia.

Tuntaskan Kasus Masa Lalu

Direktur Yayasan Depati, Ali Goik, mengungkapkan, ketiga capres yang maju di Pilpres 2024 merupakan sosok pilihan terbaik dari partai. Terlepas siapapun yang akan terpilih memimpin Indonesia, jejak digital dan latar belakang mereka tidak akan pernah hilang.

Prabowo Subianto yang tersandung isu pelanggaran HAM dan sempat tinggal di Yordania usai dipecat dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad. Namun hingga saat ini, Prabowo Subianto tidak pernah di sidang terkait pelanggaran HAM dan memang harus dibuktikan lebih detail.

Dengan diangkatnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, Ali Goik menilai hal tersebut membuat isu pelanggaran HAM semakin bias.

Ali berujar, Anies Baswedan juga cukup menarik. Saat berkampanye, Anies menolak reklamasi Teluk Jakarta, tapi saat menjabat malah melanggarkan reklamasi itu. Ganjar Pranowo juga tak lepas dari isu perusakan lingkungan, tapi hingga kini masih belum ada bukti konkret, sama seperti isu pelanggaran HAM yang menyerpa Prabowo Subianto.

“Jika nanti salah satu menang, itulah pilihan terbaik masyarakat Indonesia. Tapi saya berharap, sebelum terpilih, Anies, Ganjar dan Prabowo harus benar-benar menyelesaikan kasus-kasus yang menyeret nama mereka. Karena yang menang, harus menjadi presidennya masyarakat Indonesia, bukan presiden bagi partai pengusungnya,” katanya.

Aktivis lingkungan ini juga melihat kondisi lingkungan di Indonesia sudah sangat parah dan presiden selanjutnya harus memperbaiki, merestorasi dan memelihara dengan baik. Terutama menghentikan izin lingkungan dan tambang.

Apalagi di Sumsel, lingkungan di beberapa daerah sudah dirusak dengan aktivitas pertambangan. Jangan sampai galian-galian tambang malah dijadikan lokasi wisata, bukan direstorasi sesuai Undang-Undang (UU). Dia menyebut, pengalihan galian tambang ke tempat wisata merupakan reklamasi kamufase.

Koordinator Advokasi Perkumpulan Sumsel Bersih Lestari, Arlan, mempunyai pandangan berbeda dari ketiga capres tersebut. Selain tersandung isu pelanggaran HAM, Prabowo Subianto juga terkesan masih membawa sistem di era orde baru.

“Ketika Prabowo Subianto ditarik menjadi menteri, diduga untuk meredam gesekan itu. Presiden Jokowi tidak ingin masyarakat terus memelihara perpecahan.”

sebabnya Jokowi tidak mau melanjutkan isu-isu yang menurut aktivis, khususnya pelanggaran HAM, demi kepentingan rakyat. Walau begitu, Prabowo tetap berjiwa nasionalis,” ujarnya.

Lalu, Anies Baswedan dinilainya tidak terlalu banyak catatan hitam, namun cukup mengkhawatirkan jika dia menjadi presiden kedelapan. Kinerja Anies membuat Arlan ragu, apakah rencana Joko Widodo yang sudah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dan pembangunan jalan tol akan dilanjutkan.

Sedangkan, Ganjar Pranowo merupakan capres yang benar-benar keturunan asli Indonesia. Namun, banyak isu perusakan lingkungan yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan itulah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar Pranowo untuk diselesaikan.

“Apalagi di Sumsel, wilayah yang paling tidak sehat adalah di Kabupaten Muara Enim dan Lahat, dengan eksploitasi tambang terbesar. Presiden terpilih nantinya harus berani menghentikan eksploitasi tambang batu bara itu, apalagi untuk kepentingan ekspor ke luar negeri. Eksploitasi tambang batu bara sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Menurutnya, Sungai Enim dan Sungai lematang yang dulunya menjadi sumber mata air masyarakat, kini sudah tidak layak dikonsumsi karena dampak dari aktivitas pertambangan. Cadangan batu bara diperkirakan hanya tinggal 40 tahun lagi di Sumsel. Jika terus dilakukan eksploitasi, selama itulah masyarakat akan terancam kehidupannya.

Perputaran uang dari tambang batu bara memang sangat besar untuk negara, tapi tidak sebanding dengan hajat hidup masyarakat sekitar.

Ada juga isu lahan gambut yang kini dialihfungsikan menjadi areal perkebunan dan hutan tanaman. Padahal lahan gambut adalah cadangan karbon terbesar di Sumsel, namun sekarang sudah masif pembukaan areal perkebunan HTI dan sawit. ●RDR



“Partai Demokrat yang ada di semua daerah, khususnya Sumsel, pastinya harus menunggu keputusan pengurus pusat tentang apa yang harus dijalankan ke depannya”

Fahmi



KADER DEMOKRAT TUNGGU PERINTAH SBY, KOK BUKAN AHY

Partai Demokrat tengah mencoba untuk melupakan kekecewaan setelah secara diam-diam ditinggalkan Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden.

Meski begitu, kader Partai Demokrat di daerah seperti belum bisa menyembuhkan luka hatinya. Dampaknya, banyak kader Partai Demokrat enggan bersuara terkait koalisi. Mereka juga dipastikan tidak akan mengetuk pintu untuk kembali lagi ke depannya.

Kini, semua kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia tengah menunggu arahan apa yang akan dilakukan ke depannya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan, Muchendi Mahzareki, mengatakan, semua kader tengah menunggu keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“100 persen kami tidak akan kembali lagi ke koalisi. Tentunya kami kecewa, kesal, dan marah tentang apa yang telah terjadi. Untuk arahan kesepakatan partai kami menunggu perintah dari Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi,” kata dia.

Muchendi menyebut, beberapa waktu lalu, 38 DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia sudah dipanggil oleh SBY. Tujuannya untuk meminta masukan dan pertimbangan tentang kondisi yang ada.

“Kami sudah jelas dalam koalisi mempersiapkan Anies Baswedan untuk memilih dan tidak memaksakan calon AHY dari Demokrat. Tetapi tindakan Anies Baswedan membuat kami kecewa. Keputusan pertemuan itu yang pasti kami tidak ingin kembali,” jelasnya.

Dia mengakui, keputusan final arah Partai Demokrat telah diserahkan kepada SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. Dari hasil pertemuan 38 DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia akan menjadi pertimbangan.

“Untuk arahan koalisi keputusan ada di Pak SBY. Beliau akan mempertimbangkan dari hasil pertemuan itu dan memutuskan arah Partai Demokrat ke depannya,” ungkapnya.

Muchendi mengungkapkan, Demokrat masih dalam posisi memilih ke mana mereka akan berlabuh.

Menurut dia, Partai Demokrat memiliki dua pilihan, yakni ber-

gabung dengan koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

“Keputusan semua ada di Pak SBY, kemungkinan kami bergabung ke dua poros. Tentunya tidak akan kembali ke poros Anies Baswedan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Sumsel dari Fraksi Demokrat, MF Ridho, mengatakan hal serupa. Pihaknya sudah cabut dari koalisi dan tidak akan kembali lagi.

“Semua masyarakat sendiri yang menilai. Kami keluar dari koalisi karena ada sebab dan alasannya yang kuat,” katanya.

Ridho menyebut, jika ada isu yang menyebutkan Partai Demokrat akan membuat poros keempat, dia tidak tahu karena belum mendengar secara langsung.

“Namanya politik semua bisa terjadi, yang penting saat pendaftaran belum telat. Tetapi untuk poros keempat kita belum tahu soal itu. Yang jelas sekarang kami di DPD Partai Demokrat masih menunggu instruksi beberapa minggu ke depannya,” ucapnya.

Di sisi lain, ada juga kader Partai Demokrat yang memilih bergabung dengan poros PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

Masuknya Partai Demokrat ke koalisi PDIP dinilai sebagai perubahan demokrasi yang positif karena kedua partai ini punya hubungan yang tidak harmonis. Namun, pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka lembaran baru. Pertemuan ini disambut baik para kader kedua partai.

Sementara, pada kesempatan yang lain, SBY dan Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan. Pertemuan kedua elit politik dan sama-sama berasal dari kalangan militer ini membuka ruang bagi terjalinnya komunikasi politik.

“Awalnya adanya pertemuan Puan dengan Ketua Umum Pak AHY dan ada juga kedatangan Pak Prabowo menemui Ketua Majelis Demokrat Pak SBY. Ini menjadi dugaan awal, meskipun kami menilai semuanya masih misteri,” kata kader Partai Demokrat lainnya.

Terkait semua pilihan itu, Wakil Ketua 5 DPD Partai Demokrat Sumsel, Tamtama Tanjung, juga tidak mau berkomentar banyak. Sebagai kader, mereka hanya ber-

sikap tegak lurus dengan arahan partai.

“Posisi kami sekarang hanya tegak lurus. Apa kata partai ya kami ikut. Soal dengan siapa kami akan berkoalisi, saya juga tidak tahu. Tapi apapun keputusan partai, nantinya akan kami taati,” ungkap anggota DPRD Sumsel ini.

Pengamat hukum dan politik, Fahmi, mengatakan, perpecahan di dalam koalisi yang dialami Partai Demokrat adalah sesuatu yang wajar dalam politik. Dalam dinamika politik ada banyak pertimbangan kepentingan partai masing-masing.

“Biasa itu kemarin cocok, kemudian besok tidak cocok. Tentunya semua partai memiliki misi dan tujuan masing-masing. Tinggal sekarang Partai Demokrat yang mau ikut ke mana atau berjalan independen. Semuanya tergantung pilihan dari pemegang kekuasaan tertinggi di partai,” jelasnya.

Praktisi hukum ini juga menilai, DPD Partai Demokrat sekarang harus bertindak mengikuti instruksi karena semua tindakan dan apapun yang dilakukan harus seimbang dengan keputusan pusat.

“Partai Demokrat yang ada di semua daerah, khususnya Sumsel, pastinya harus menunggu keputusan pengurus pusat tentang apa yang harus dijalankan ke depannya. Karena sekarang ini keputusan apapun harus merujuk ke Partai Demokrat pusat,” terangnya.

Wacana pembentukan poros keempat sebetulnya sempat tercetus di antara para kader tersebut dengan mengajak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, wacana itu sulit terwujud karena kedua partai itu masih bertahan di koalisi masing-masing.

●RDR





“Kejahatan siber meningkat pada Pemilu 2024. Sehingga perlu peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi politik saat ini”

Hasanal Mulkan

PELANGGARAN SUDAH TERJADI RELAWAN SIAPKAN ANTISIPASI

Kecurangan-kecurangan jelang Pemilu 2024 telah terdeteksi dan banyak terjadi di berbagai daerah. Namun, hingga kini belum ada tindakan apapun dari penyelenggara pemilu karena dianggap bukan masuk tahapan pemilu.

Ketua Barisan Pemantau Pemilihan Pemilu Republik Indonesia (BP2-RI) Sumatera Selatan, Prasetya Sanjaya, mengatakan, dari para calon pemilih Pemilu 2024, mereka telah mendapatkan beragam kecurangan politik yang terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian pihaknya untuk melakukan tindakan dan antisipasi.

“Isu tersebar yang kami terima itu yakni ada warga yang mati, orang gila dan tempat tinggal dan domisili tidak sama akan dipakai untuk kecurangan Pemilu 2024. Nah, ini akan kami antisipasi,” kata dia.

Rawannya kecurangan pemilu telah dideteksi secara dini ini akan ditindaklanjuti BP2-RI Sumsel dengan merangkul tim-tim advokasi untuk melakukan perlawanan secara administratif dan hukum.

“Sekarang kami mau menjalin kerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan. Mereka adalah kumpulan tim advokasi di Sumsel yang akan membantu kami apabila harus berurusan ke arah yang lebih jauh,” kata dia.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, mereka akan mengumpulkan data kecurangan dan melakukan proses hukum melalui yayasan bantuan hukum tersebut. Pihaknya akan menggugat apabila ada kecurangan politik yang terjadi di seluruh wilayah di Sumsel.

“Kalau ada laporan dari masyarakat, akan kami jadikan delik aduan. Namun, kalau ada temuan dari kami, tentunya akan kami gugat langsung ke Sentra Gakkumdu,” tegasnya.

Dia mengakui, pihaknya saat ini tengah melebarkan sayap untuk melantik BP2-RI Sumsel di 17 kabupaten dan kota. Selain melakukan pelantikan, tahapan sosialisasi kerja dan kinerja BP2-RI Sumsel, juga harus disosialisasikan kepada anggota dan calon anggota di setiap wilayah.

“Kami masih melakukan pelantikan dan sosialisasi serta pelatihan. Karena kami harus sesegera mungkin mengaktifkan anggota BP2-RI di seluruh Sumsel terlebih dahulu,” ucapnya.

Kedepannya, BP2-RI Sumsel

juga akan membuat posko pengaduan di setiap wilayah. Posko pengaduan itu untuk merangkum semua pelanggaran yang terjadi agar bisa ditindaklanjuti. Selain pengaduan, akan dibuat di sekretariat masing-masing wilayah pengadu via online yang dibuka di media sosial.

“Perkembangan elektronik sekarang sudah pesat, posko pengaduan juga akan bisa kami buka di akun Instagram. Tetapi sekarang belum kami buka baik itu di seluruh wilayah. Namun kalau ada pelanggaran pastinya bisa langsung ke sekretariat kita saja,” jelasnya.

Ragukan Data KPU

Agar akurasi pelanggaran yang terjadi dapat ditingkatkan, BP2-RI Sumsel juga kini menjalin komunikasi dengan KPU untuk mendapatkan data dan informasi.

“Kami akan berkomunikasi dengan KPU secepatnya untuk data calon pemilih Pemilu. Data itu akan kami samakan dengan isu-isu yang tersebar itu. Tentunya untuk mengantisipasi saat pemilihan terjadi kecurangan tersebut,” ungkapnya.

Sanjaya menilai kecurangan politik tetap ada meskipun data dari KPU sudah terverifikasi keampuhannya. Namun demi mendapatkan kekuasaan dan kepentingan politik, kecurangan akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

“Ada data KPU tidak menjamin juga, kecurangan bisa tetap dilakukan. Makanya peran kami sebagai pemantau hadir di pelaksanaan Pemilu. Makanya kami konsentrasi kepada pembentukan kad-

er, simpatisan, dan anggota kami di setiap wilayah di Sumsel,”

terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya berjanji akan bekerja ekstra keras untuk melakukan pengawasan dan pengawalan. Setelah melakukan kerja sama dengan lembaga hukum, pelanggaran pemilu juga akan siap dieksekusi ke ranah hukum.

Terkait pelanggaran Pemilu 2024, Panit III Subdit V Siber Polda Sumsel, Iptu Abu Hair, mengatakan, mereka mengantisipasi serangan siber dan hoaks yang sedang ramai diberitakan media. Meski secara signifikan belum terlihat, namun menjelang pilpres, pelanggaran itu akan semakin nyata.

“Terkait pemilu, kami sudah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. Untuk sekarang belum terlihat, namun kalau dikaitkan peristiwa pencemaran nama baik dengan orang-orang yang akan mencalonkan diri pada saat pemilu, ya mungkin ada kaitannya,” ungkap Abu Hair.

Dari pengalaman Pemilu 2019, pelanggaran siber yang banyak tercatat di Polda Sumsel adalah pencemaran nama baik.

“Penyebaran berita bohong, jadi modus kejahatan yang mereka lakukan. Dari penyerangan itu tujuannya untuk menjelekan se-

seorang mungkin mendapatkan sesuatu (keuntungan), yang belum kita ketahui,” jelasnya.

la mena- bahkan,

terkait pemilu pihaknya sering memberikan edukasi, baik di acara seminar dan lain-lain, yang menjelaskan agar jangan mudah percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

“Ketika kita menemukan akun-akun yang mungkin tidak benar atau menyebarkan berita bohong terkait pemilu, itu bisa kita laporkan,” bebernya.

Tujuan laporan tersebut supaya akun-akun penyebar berita bohong itu bisa terblokir dan diharapkan tidak lagi tersebar. “Atau bisa langsung kepada pihak kepolisian dan akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan akun mana yang akan di take down Badan Reserse Kriminal Polri, selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Kominfo,” tuturnya.

Pengamat dan akademisi Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Hasanul Mulkan, mengatakan, kejahatan siber jelang Pemilu 2024 sudah ada mengaturnya, yakni pada Pasal 33 UU ITE.

“Isinya kategori perbuatan yang dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik, jelas UU Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur itu,” katanya.

Apabila terbukti melanggar, maka hal itu merupakan sanksi pidana. Kontrol pertama dari pihak kepolisian.

Dia memprediksi, kejahatan siber meningkat pada Pemilu 2024. Sehingga perlu peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi politik saat ini.

“Kepada pengguna internet jangan mudah terprovokasi. Pesan saya, jangan sampai menyampaikan berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.

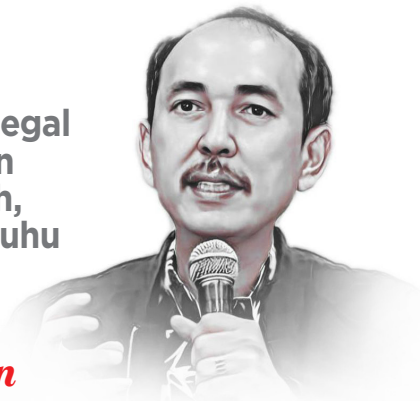
Hal senada dikatakan Febrian yang tegas mengatakan kalau pelanggaran pemilu dipastikan terjadi. Politik uang yang akan marak dilakukan oleh para oknum yang sangat haus kekuasaan.

“Politik uang kapan akan berakhirnya? Tidak akan berakhir selama ada oknum yang haus akan kekuasaan. Artinya pelanggaran dari sisi manapun pasti terjadi terutama politik uang,” tegasnya. ●RDR



“Bila tindakan jegal menjegal ini menyebar sebagai tren politik di berbagai daerah, maka bisa dibayangkan suhu politik akan makin panas enggak karuan”

Yanuar Prihatin



DPR MARAH BESAR CAK IMIN DITOLAK BUPATI

Penolakan Bupati Tanah Laut, Sukamta, atas kehadiran Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) membuat Wakil rakyat di Senayan berang. Komisi II DPR kemungkinan akan segera memanggil sang kepala daerah terkait penjegalan kepada Ketua Umum PKB itu.

“Tidak tertutup kemungkinan Komisi II akan memanggil Bupati Tanah Laut untuk menjelaskan tindakannya agar bupati/wali kota lainnya, apa pun partainya, tidak gegabah lagi dalam melakukan suatu tindakan di wilayahnya masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin di Jakarta, Jumat, 8 September 2023.

Menurut Yanuar, tindakan penjegalan tersebut tergolong tidak pantas untuk dilakukan seorang pejabat publik. Apabila tidak diklarifikasi dengan benar, maka tindakan tersebut terkesan penjegalan politis.

Seperti diketahui, belum lama ini Cak Imin resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, pada Pilpres 2024. Selain itu, tak berselang lama, Cak Imin juga mendapatkan pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus rasuah di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012.

Yanuar mengatakan, selain memberi contoh buruk bagi kepala daerah lain, dia mengkhawatirkan langkah tersebut menjadi tren politik yang merusak iklim demokrasi.

“Bila tindakan jegal menjegal ini menyebar sebagai tren politik di berbagai daerah, maka bisa dibayangkan suhu politik akan makin panas enggak karuan. Ini berpotensi membahayakan iklim demokrasi yang sehat, santun, etis, dan transparan,” katanya.

Yanuar menilai jabatan kepala daerah seharusnya tidak disalahgunakan untuk merusak hubungan kelembagaan di antara pejabat publik. Sebab, perbedaan pilihan politik bukanlah alasan melarang seorang pejabat publik lainnya tampil di wilayahnya.

Terle-

bih, Muhaimin Iskandar hadir di Kabupaten Tanah Laut bukan dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik ataupun kandidat bakal calon wakil presiden, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Jadi tidak ada urusan dengan dukungan mendukung secara politik. Bagi pejabat publik seperti pimpinan DPR itu hal biasa datang untuk membuka suatu acara. Bahkan, tidak jarang acara tersebut dilakukan pemerintah daerah yang biayanya sudah pasti dari APBD. Kejadian semacam ini tergolong biasa saja,” tuturnya.

Menurut dia, Bupati Tanah Laut keliru jika acara yang dibiayai anggaran daerah tersebut dibuka oleh Muhaimin, maka akan menjadi masalah besar. Hal itu lantaran tidak ada aturan yang dilanggar bila pimpinan DPR hadir membuka atau menjadi narasumber suatu acara di daerah.

“Justru pelarangan itulah yang menjadi masalah besar. Ini tahun politik. Semua hal yang kontroversial akan mudah sekali dipersepsikan sebagai tindakan politik,” ucapnya.

Untuk itu, Yanuar memandang Kementerian Dalam Negeri harus memberikan teguran atas penjegalan yang dilakukan Bupati Tanah Laut tersebut sebagai antisipasi agar langkah serupa tidak menjadi tren yang menyebar ke kabupaten/kota lainnya.

“Ini masalah serius, maka Kemendagri sebagai pembina politik dalam negeri harus memberikan teguran terhadap kepala daerah yang ‘over action’,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar batal membuka acara MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 6 September 2023. Sempat muncul kabar adanya tekanan kepada Bupati Tanah Laut Sukamta.

Cak Imin menyampaikan, Bupati Sukamta tidak berkenan dirinya untuk membuka acara itu. Padahal, kedatangannya ke Tanah Laut atas undangan Pimpinan Pusat Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH).

Selain itu, Cak Imin juga sudah menempuh perjalanan darat selama dua jam dari Kota Banjarmasin menuju Tanah Laut.

“Sudah sampai di sana tiba-tiba KH Saifullah Ma’shum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangs-nangis. Pak Bupati tidak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka,” ujar Cak Imin di Nasdem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 6 September 2023.

Karena Bupati Tanah Laut tak berkenan, Ketua Umum PKB tersebut pun tak membuka acara tersebut. Cak Imin tetap datang menonton pelaksanaan MTQ internasional itu. Namun, lagi-lagi Bupati Sukamta tak berkenan ia menonton acara tersebut.

Dengan nada bercanda, Cak Imin mengaku marah kepada KH Saifullah Ma’shum.

Ma’shum karena gagal membuka dan tak boleh menghadiri MTQ internasional di Tanah Laut. Padahal, kedatangannya berstatus sebagai wakil ketua DPR, dan acara tersebut digelar oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin, marahnya saya, saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya, saya capek sebetulnya untuk ke sini, ternyata sampe sini sampean nggak jelas ngundang saya,” ujar Cak Imin.

“Kalau gitu tidak usah undang saya, terus bilang ke Pak Saifullah, ‘Pak Kiai jalan aja terus tidak perlu ada saya tidak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah ke sini tolong saya foto di backdrop-nya saja,’” kata sambungannya.

Da juga menyampaikan, sebenarnya tak ada intimidasi yang diterimanya ketika sampai di Kabupaten Tanah Laut. Namun, Bupati Sukamta hanya tak berkenan ia membuka dan menghadiri acara MTQ internasional. “Jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali, semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot,” akunya.

Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, Bupati Tanah Laut selaku tuan rumah penyelenggaraan MTQ disebut telah mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu agar Cak Imin ditolak memberikan sambutan.

Jazilul menerangkan, Bupati Tanah Laut diancam apabila tak mau menolak kehadiran Cak Imin. Oleh karenanya hingga kembali ke Jakarta, Cak Imin tak diberi kesempatan dalam acara MTQ.

“Informasi yang saya terima, Gus Imin kembali sesuai jadwal kepulangannya, namun batal membuka MTQ Internasional tersebut, itu atas permintaan Bupati Tanah Laut yang mengaku mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu agar Gus Imin ditolak memberikan sambutan pada acara tersebut,” ungkap Jazilul.

Wakil Ketua MPR itu berharap agar dilakukan pengusutan oleh aparat penegak hukum dan panitia MTQ siapa terduga dalang batalnya pembukaan MTQ oleh Cak Imin, berikut motif di belakang penolakan tersebut.

“PKB berharap peristiwa ini diusut siapa dalang dan apa motif mereka yang mengintimidasi Bupati tanah Laut untuk menolak kehadiran Gus Imin pada arena MTQ. Sungguh, Ini kejadian aneh,” tegasnya.
•RDO





“Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di Masyarakat”

Ujang Komarudin

CALON PRESIDEN PECAH BELAH UMAT MENAG: JANGAN DIPILIH!

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

“Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih,” kata Menag Yaqut saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu, 3 September 2023.

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. “Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok,” kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan. “Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih,” tegasnya.

Menag menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemandirian negeri ini.

“Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden, dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya,” kata Menag.

Menag berharap Tarekat Tijaniyah dapat mengambil peran yang lebih besar menjelang tahun politik untuk mendamaikan umat, agar umat bisa tetap tenang, teduh, dan damai meskipun berbeda-beda dalam pilihannya.

“Bagaimana memilih pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan amanah untuk memimpin bangsa besar. Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu menjadi kekuatan kita,” ujar Yaqut.

Sebelumnya, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Amien Suyitno, juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian itu untuk menolak politik identitas karena dapat mengancam persatuan. Ia mendorong ASN harus menjadi agen yang bisa mengelimina-

si setiap penggunaan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan.

“Saya ingin menyampaikan pesan Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas) tentang perlunya menolak politik identitas,” ujar Amien.

Amien mengatakan politik identitas harus ditolak karena sangat berbahaya bagi harmoni dan kerukunan masyarakat Indonesia. Menurut dia, politik identitas dengan identitas manusia berbeda. Setiap orang tentu memiliki identitas masing-masing, baik jabatan, pekerjaan, kelompok gender, maupun agama, dan suku bangsa.

“Mengapa kita harus menolak politik identitas? Kalau terkait pentingnya identitas, memang iya. Lalu, apanya yang kita tolak? Yaitu politik identitas yang digunakan untuk

kepentingan politik,” kata dia.

Menurut Suyitno, identitas yang melekat, seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tentu tidak bisa ditolak. Sebab, semua itu merupakan bawaan lahir. Akan tetapi, jika itu digunakan untuk kepentingan politik praktis, harus ditolak.

“Sebab, itu berbahaya. Apalagi, politik identitas dengan nomenklatur agama itu lebih berbahaya lagi. Karena kita punya pengalaman bahwa hal itu bisa menjadikan disharmoni antarkeluarga,” katanya.

Amien menambahkan, disharmoni antarkeluarga masih bisa ditemui di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2019. Maka dari itu, menjadi penting untuk menolak politik identitas demi memperkuat harmoni di tengah perbedaan.

“Mereka belum move on. Ini nyata dan ini harus kita cegah,” kata dia.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menanggapi imbauan Menag agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai

alat politik menjelang Pilpres 2024. Cak Imin itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan menganut nilai-nilai kebangsaan yang sama.

“Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI Tahun 1945, itu sudah final. Komitmen saya dengan Mas Anies,” ujar Cak Imin di Sekretariat PB PMII, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Apabila disangkutkan dengan politik identitas, Cak Imin dan Anies dengan tegas menolak hal itu. Kendati demikian, dia tak memungkirkan setiap masyarakat memiliki identitas sendiri.

Adapun politik identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.

“Akan tetapi, kami tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk politik identitas yang berkembang,” katanya.

Namun begitu, Menag diingatkan agar berhati-hati dalam memberikan pernyataannya berkaitan politik menuju Pilpres 2024. Hal ini karena pernyataannya yang mengimbau masyarakat tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, jangan sampai pernyataan dari Menag justru malah memicu perpecahan di antara masyarakat.

“Gus Yaqut semestinya tidak membuat pernyataan-pernyataan kontradiktif atau anomali yang bisa memicu pertentangan di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang justru akan mendapatkan respons yang negatif dari publik,” kata Ujang, Selasa, 5 September 2023.

Ujang mengatakan, meski sah-sah saja dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi Gus Yaqut saat ini adalah pejabat publik. Karena itu, alih-alih mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi, sebaiknya fokus bekerja menjalankan visi misi presiden.

Sebab, pernyataan tersebut justru berpotensi memicu munculnya politik identitas yang saat ini sudah jauh menurun dibandingkan Pilpres 2019.

“Para pejabat termasuk para menteri tidak perlu membuat pernyataan tidak perlu. Karena masyarakat sudah paham sudah tahu bahwa politik identitas harus ditinggalkan, politik SARA juga harus dihilangkan, adu domba juga harus dienyahkan, itu publik masyarakat sudah tahu itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengingatkan untuk menghormati pilihan politik setiap orang. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara perbedaan politik.

“Kita harus hilangkan ego, lalu juga memahami perbedaan, dan kita harus hormati beda pilihan siapapun di antara anak bangsa. Dan untuk tidak membangun politik yang berdasarkan identitas, SARA, fitnah dan narasi negatif lainnya,” ujarnya. •RDO



“Rata-rata kalangan masyarakat dengan kondisi ekonomi ke bawah dan pendidikan setara SMP ke bawah yang paling rentan terdampak money politic”

Khairil Amri



PELUANG MENANG TANPA POLITIK UANG

Banyak cara dilakukan para calon anggota legislatif untuk meraih popularitas dan dukungan dari masyarakat, mulai dari blusukan, menyalurkan bantuan, dan beragam cara lainnya.

Tak sedikit oknum caleg yang melakukan cara curang, seperti politik uang atau money politic agar lebih mudah mendapatkan suara masyarakat. Hal itu dilakukan secara diam-diam, untuk memuluskan jalannya menuju kemenangan.

Meski begitu, ada juga caleg yang menggaet popularitas di masyarakat dengan cara yang unik. Seperti yang dilakukan caleg PDIP Sumatera Selatan, Rizky Pratama Saputra. Rizky akan bertarung di daerah pemilihan 6 Jakabaring yang meliputi kawasan Seberang Ulu 1, Kertapati, dan Jakabaring Palembang.

Sudah bergabung di PDIP sejak 23 tahun lalu, dia kini didapuk menjadi Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) DPC PDIP Palembang. Untuk kesekian kalinya, dia mencoba peruntungan di pemilihan legislatif (pileg) dengan berbagai cara.

Mengevaluasi kekalahan di beberapa kali pileg, Rizky akhirnya tahu bagaimana cara agar lebih populer di kalangan masyarakat, sehingga bisa meraih

suara terbanyak dan memenangkannya sebagai wakil rakyat di DPRD Palembang. Salah satu yang dilakukannya adalah mengunjungi warga secara door to door.

“Saat harga telur di pasaran mencapai Rp33 ribu per kilogram dan harga beras yang naik, saya langsung bergerak menyumbangkan telur dan beras ke 1.000 orang kepala keluarga (KK) di dapil saya sembari mengenalkan saya sebagai caleg. Saya dibantu 4.000 orang anggota tim saya,” ujarnya.

Rizky mengaku lebih tertarik menampung aspirasi masyarakat daripada membuka ruang diskusi. Karena dengan itu, apa yang dibutuhkan masyarakat bisa tersampaikan, seperti masalah penerangan, ketersediaan air, kesehatan dan tingkat kesejahteraan. Warga juga meminta untuk memfasilitasi keamanan, karena tingginya tindak kriminal di kawasan dapil tersebut.

Dia juga mengakui, kekalahan di beberapa pemilu karena bersaing dengan caleg-caleg yang menggunakan money politic. Namun hingga kini, dia tidak tertarik melakukan cara berkampanye seperti itu karena tidak mendidik masyarakat.

“Lebih efisien turun secara langsung. Karena masyarakat ingin tahu bagaimana sosok calon wakil rakyatnya.

Saat turun di dunia politik, jangan menghitung-hitung cost yang keluar, tetap berusaha, walaupun kita tidak tahu akhirnya

menang tidaknya,” katanya.

Dia pun berjanji jika terpilih menjadi wakil rakyat akan mewujudkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas di dapilnya. Bahkan, dia akan menyisihkan sebagian gajinya sebagai wakil rakyat untuk membantu masyarakat sekitar.

Sebagian gajinya itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, menyediakan air bersih, membantu penerangan daerah, hingga pembinaan UMKM dan menyediakan sembako.

“Karena saya punya prinsip, hidup saya sekarang berkecukupan. Sudah jadi anggota dewan nanti, saya ingin sama seperti ini. Makanya gaji saya nanti akan saya sisihkan untuk masyarakat agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia,” ungkap Sekretaris Forum Rakyat Peduli Sosial (FRPS) Sumsel ini.

Dari salah satu lembaga survei di Indonesia yang ada di Sumsel, dia menduduki posisi delapan besar dari seluruh jumlah caleg di dapil 6. Jurnalis sekaligus pengusaha ini yakin, akan memenangkan kontestasi Pileg 2024. Terlebih, banyak petahana di dapilnya sudah banyak yang tidak ikut mencalonkan diri.

Selain Rizky, ada pula caleh dari Partai Buruh, M Riza Vahlevi, yang merupakan caleg DPRD Sumsel Dapil 10 Kabupaten Banyuasin, yang juga menolak menggunakan money politic untuk mendongkrak popularitas di masyarakat.

Koordinator Nasional Sayap Millenial ORANGE-B dan Ketua Bapilu EXCO Partai Buruh Sumsel ini menyebut, sebagai perwakilan anak muda, dia mempunyai tanggung jawab sosial ikut berpartisipasi dalam dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, untuk mendapatkan popularitas dan elektabilitas menjadi hal penting, namun harus ada strategi khusus.

Sebagai generasi yang mencoba menggapai perolehan suara dari kalangan anak muda, ada beberapa strategi yang harus dilakukan, seperti akrab bermedia sosial dengan membuat kampanye unik dan tidak jadul.

“Kita juga terjun ke lapangan, melakukan komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan visi dan misi program kerja, baik secara personal maupun program kerja partai kepada kalangan anak muda dan kelompok masyarakat tentang fungsi dan tugas lembaga legislatif dalam membuat peraturan yang berdampak secara luas. Menjadi caleg harus memiliki karakteristik berintegritas, tidak kaku, dan membaur bersama masyarakat, caleg jangan bersandiwara,” katanya.

Dia mengatakan, politik uang harus menjadi musuh bersama agar ke depan dapat menghasilkan calon anggota legislatif atau pemimpin yang dapat bekerja untuk masyarakat, bukan berpikir mengembalikan modal kampanye.

Politik uang biasanya dilakukan oleh caleg yang tidak mengedepankan program kerja sebagai jalur sosialisasinya dan justru mengedepankan modal uang untuk meraih simpati masyarakat.

“Jelang pemilu mendatang, masyarakat dapat merasakan caleg musiman, mereka datang hanya saat mulai pemilu. Ke mana saja selama ini?” ujarnya.

Riza mengungkapkan, secara objektif aksi simpati hingga kini masih menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melihat mana bakal calon wakilnya atau pemimpin mereka ke depan yang akan bekerja untuk rakyat. Dalam dunia jurnalistik, aksi simpati biasanya dilakukan secara sukarela dan aksi money politic justru membuat pemimpin atau wakil rakyat tidak mengenal rakyatnya.

“Saya contohkan, saat saya bekerja sebagai jurnalis, banyak sekali keluhan masyarakat yang dilaporkan untuk dipublikasikan dan diberitakan agar didengar oleh pemerintah dan wakil rakyat mereka. Pertanyaannya adalah apakah wakil rakyat tidak mengenal atau berkomunikasi dengan rakyatnya, sehingga harus rakyat mengeluh lalu dipublikasikan terlebih dahulu, baru kemudian turun aksi sebagai pahlawan kesigihan, itukan miris,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Survei (ISU), Khairil Amri, mengatakan, dari hasil survey yang terbaru, 80 persen masyarakat di Sumsel sudah mengetahui tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai caleg. Namun, caleg yang turun langsung ke masyarakat yang lebih populer dibandingkan yang menggunakan money politic.

Menurutnya, money politic saat ini tidak terlalu berdampak pada pilihan masyarakat. Yang lebih disukai warga adalah caleg-caleg yang mengenalkan diri secara langsung dan memberikan bantuan





“Kalau melihat arus utama dan kecenderungannya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo”

Adi Prayitno

PPP TAK ADA PILIHAN HANYA BISA DUKUNG GANJAR

Lobi-lobi politik di internal koalisi PDIP semakin alot. Pasalnya, nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo tak kunjung mengemuka di publik. Yang ada, justru ada gejolak dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ikut bergabung dalam koalisi.

Gejolak tersebut mulanya terjadi saat Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, membuka wacana akan loncat ke koalisi lain, apabila Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno, tak disepakati menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

Arsul beralasan saat melontarkan wacana tersebut di awal Agustus kemarin, dengan menyebut banyak akar rumput di PPP yang belum setuju partai berlogo Ka'bah itu bergabung bersama PDIP. Sehingga, ada kemungkinan peralihan arah politik, termasuk jika Sandiaga Uno tak menjadi cawapres Ganjar.

Panasnya suhu politik di internal PPP pun menguat pasca Arsul membuka wacana tersebut. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya rapat internal mendadak pada Selasa malam, 8 Agustus 2023, dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, didampingi Sekretaris Jenderal, Arwani Thomafi. Hadir juga jajaran pengurus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh Indonesia secara daring.

Hasil dari rapat tersebut, disampaikan oleh Juru Bicara PPP, Usman Tokan, adalah membahas pernyataan Arsul, yang secara kelembagaan dinilai telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, karena dipastikan yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI itu telah melampaui kewenangannya dan tak sesuai fakta perkembangan di internal koalisi.

Bahkan, desas-desus yang beredar menyebutkan, Arsul yang di-mutasi dari Komisi III DPR menjadi anggota Komisi II DPR merupakan bagian dari sanksi yang diberikan, karena telah mewacanakan PPP akan loncat koalisi jika Sandiaga Uno tak di-s-e-t-u-jui

menjadi cawapres Ganjar.

“Seharusnya (Arsul) memahami betul mekanisme yang ada di tubuh Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah pakarnya hukum, kok bisa bicara sudah melampaui kewenangannya melebihi AD/ART,” ungkap Usman dalam siaran persnya yang beredar.

Kendati begitu, PPP memastikan akan tetap berada di PDIP. Tetapi di sisi yang lain, Usman menyatakan partai yang dipimpin Mardiono akan tetap konsisten memperjuangkan amanat rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP untuk menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar.

“Rapimnas berikutnya menetapkan Pak Sandiaga Salahudin Uno selaku kader partai sebagai cawapres mendampingi Mas Ganjar,” sambung Usman.

Bicara peluang Sandiaga Uno menjadi cawapres Ganjar, nampaknya memang tidak cukup kuat. Sebab, dalam suatu acara diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023, politisi PDIP, Masinton Pasaribu sempat ditanya mengenai bocoran nama cawapres yang akan dideklarasikan.

Di antara nama-nama yang beredar di publik, Masinton sama sekali tidak menyebut Sandiaga Uno sebagai salah satu yang masuk radar PDIP. Justru, anggota Komisi III DPR itu malah menyebutkan nama politisi Partai Golkar yang baru saja pensiun menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, h i n g g a Ketua Umum Partai Demokrat,

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Nama Mas Ridwan Kamil masuk dalam radar, seperti disampaikan Mbak Puan Maharani (Ketua DPP PDIP dan sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar). Bahkan ada nama Mas AHY, ada Prof. Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), Pak Andika Perkasa (mantan Panglima TNI), dan ada beberapa nama lagi,” ucap Masinton dalam acara diskusi OTW 24 yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKOPI.

Di antara nama-nama yang menguat menjadi cawapres Ganjar, bisa saja salah satunya akan disepakati Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik wewenang tertinggi di internal partai dan paling berpengaruh di koalisi.

“Ya mungkin bisa saja (salah satu di antara nama-nama yang beredar). Cuma kan kita enggak tahu, keputusannya kan nanti. Kita tunggu saja kapan ada breaking newsnya,” ujarnya.

Namun, Masinton memastikan PDIP memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam memilih sosok cawapres bagi Ganjar yang juga baru saja berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023.

“Tentu dalam aspek elektoral ini, dalam pemilihan ini kan Jawa itu kunci. Karena populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, tentu semua rebutan di Pulau Jawa. Artinya, kita juga enggak boleh mengabaikan aspek luar Jawa,” paparnya.

“Karena sudah di atur dalam UU (pemilu) pemenang harus memperoleh lebih dari 50 persen per provinsi. Maka, ketika Jawa adalah kunci, semua konsentrasi ke sana. tetapi kita tidak boleh abai dalam konteks ke-Indonesian

kita,” sambung Masinton.

Kecamuk permasalahan yang terjadi antara PDIP dan PPP tersebut dipandang sebagai suatu dinamika politik yang biasa terjadi jelang kontestasi Pilpres oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno.

“Perbedaan pendapat di antara partai itu pasti ada ya. Termasuk di PPP. Tapi kalau melihat arus utama dan kecenderungannya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong bersama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Artinya, secara mayoritas dan kelembagaan hari ini, PPP tetap menyatakan tegak lurus bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo,” tutur Adi kepada Info Indonesia, Jumat, 8 September 2023.

Kalau ada elit tertentu yang berbeda sikap politik, Adi menilai hal itu hanya sebagai wacana yang sengaja digaungkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, belum menjadi keputusan final PPP dan itu sebagai satu hal yang lumrah terjadi.

“Seperti Pak Arsul yang punya sikap politiknya berbeda dan disikapi internal, itu fenomena biasa dalam politik kita. Karena yang akan dilihat di kita pada prinsipnya adalah keputusan resmi dari partai pendukung tetap di PDIP atau pindah ke lain hati,” katanya.

Dia berpendapat, kejadian beda pendapat antar elite partai banyak terjadi di selain PPP. Dia mengistilahkan persoalan tersebut sebagai bias politik yang disebabkan ketidakmatangan konsolidasi di internal di segala tingkatan.

Dari banyak kasus yang terjadi, pengajar politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu meyakini PPP telah dikandangi PDIP, mengingat sampai saat ini posisi Partai Ka'bah punya peluang membantu perolehan suara Ganjar di Pilpres 2024.

“Memang partai tidak bisa mengontrol secara aklamatif soal sikap dan kecenderungan perilaku elitnya. Pasti ada saja yang nyempil, pasti ada saja yang berbeda. Tapi yang dilihat oleh publik adalah bagaimana keputusan formal, keputusan final dari partai itu dalam Pilpres. Kalau PPP sejauh ini kecenderungan mayoritas politiknya lebih banyak tetap bersama PDIP dan Ganjar Pranowo,” tutup Adi. •RDO





PARTAI UMMAT TAKUT GAGAL AJUKAN GUGATAN KE MK

Sejumlah partai politik diprediksi gagal lolos ke Senayan karena tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen. Salah satu yang disebut tidak bisa lolos adalah Partai Ummat.

Meski mengaku santai dengan hasil sejumlah lembaga survei, Partai Ummat tetap saja punya kekhawatiran gagal mengirimkan kadernya ke Senayan. Hal itu bisa terlihat ketika Partai Ummat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam Pasal 414 Ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menilai, ambang batas parlemen 4 persen itu sangat membebani partai politik peserta pemilu. Selain itu, aturan mengenai syarat untuk memenuhi ambang batas parlemen tidak berdasar.

“Karena logikanya tidak masuk akal dan sangat merugikan partai politik peserta pemilu,” kata Ridho di Jakarta, Kamis, 7 September 2023.

Pasal 414 Ayat (1) tersebut berbunyi, “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Ridho mengatakan, Pasal 414 Ayat (1) tersebut merupakan aturan yang tidak memberikan keadilan bagi partai politik. Aturan tersebut hanya memberikan keuntungan kepada partai politik yang sudah sering mengikuti pemilu.

“Karenanya, Partai Ummat akan mengajukan judicial review atau peninjauan kembali atas pasal bermasalah ini dan kami mengajak segenap anak bangsa agar bersama-sama menegakkan keadilan,” tegas Ridho.

Dia menegaskan, partainya bertekad untuk melawan seluruh upaya kezaliman yang dilakukan kelompok tertentu demi

mengambil keuntungan dari aturan yang bermasalah ini.

Dia menjelaskan, partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR di 47 Daerah Pemilihan belum tentu bisa menempatkan 47 wakilnya di parlemen bila 47 kursi itu diperoleh dari dapil yang jumlah pemilihnya sedikit.

Sebaliknya, kata Ridho, meskipun hanya memperoleh 19 kursi, tapi bila kursi tersebut didapatkan dari dapil yang jumlah pemilihnya banyak, maka partai politik tersebut bisa langsung melenggang ke DPR.

“Keganjilan ini bersumber dari ambang batas parlemen 4 persen yang basisnya adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak adil dan cara berpikirnya ganjil,” kata Ridho.

Hasil kajian dan simulasi yang dilakukan Partai Ummat menunjukkan partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan beberapa kursi di dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara dengan lebih dari 8 persen jumlah total kursi DPR. Namun, bila 47 kursi itu dikonversi menjadi suara, maka hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional.

“Dengan demikian, maka partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan karena ambang batas parlemen itu 4 persen suara sah nasional. Jelas ini cara berpikirnya kacau,” jelas Ridho.

Ridho mengatakan, ketidakadilan ambang batas parlemen ini bisa dilihat pada kasus PPP yang pada Pemilu 2019 meraih 4,52 persen suara sah nasional. Padahal PPP hanya meraih 19 kursi dari dapil padat penduduk di sejumlah

provinsi.

Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho, sangat tidak masuk akal, tidak proporsional, dan tidak adil.

“Bahkan, lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Partai Ummat memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, dan membatalkannya demi hukum, serta melakukan perbaikan terhadap aturan tersebut.

Partai Ummat memohon kepada MK agar basis ambang batas parlemen tidak hanya didasarkan pada jumlah 4 persen suara atau voters, tetapi juga jumlah 4 persen kursi di parlemen.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengatakan, langkah Partai Ummat untuk menggugat ambang batas parlemen bentuk kekhawatiran dari partai besutan Amien Rais.

“Ini bisa jadi memang kekhawatiran Partai Ummat karena melihat banyaknya partai berasaskan keislaman yang mengikuti kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang,” kata Iwan.

Dia menyebut, ceruk pemilih antara Partai Ummat dengan partai yang berbasis Islam relatif sama. Maka, Partai Ummat akan sangat kesulitan merebut suara pemilih Islam.

“Sehingga ceruk pasar pemilih mereka relatif sama dan menyulitkan Partai Ummat sebagai partai baru untuk bisa merebut penuh suara pemilih Islam,” jelas pria yang akrab disapa Iwan itu.

Iwan mengatakan, karena

ceruk pemilih Partai Ummat dengan partai berbasis itu sama, maka partai berambang perisai bintang emas itu merasa berat untuk mencari ambang batas parlemen.

“Jadi secara kalkulasi hitungan partai umat merasa berat untuk bisa memenuhi ambang Batas parlemen 4 persen,” terang Iwan.

Keberadaan Amien Rais di Partai Ummat juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap pemilih Islam. Dia memprediksi basis pemilih Partai Ummat ialah Muhammadiyah.

“Dengan adanya Amien Rais di dalam Partai Ummat bisa jadi hanya bisa sedikit meraih suara pemilih Islam, khususnya suara Muhammadiyah,” kata Iwan.

Padahal, semua partai politik peserta pemilu ingin merebut ceruk pemilih muda yang diperkirakan mencapai 60 persen dari total suara sah. Iwan menyebut, Partai Ummat masih cenderung menjadi partai tertutup yang hanya mengkampanyekan tentang keislaman.

“Sehingga akan sulit meraih suara diluar ceruk pasar tradisionalnya,” ujar Iwan.

Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023, disebutkan hanya 7 partai peserta Pemilu 2024 yang lolos ambang batas parlemen. Artinya, dari 18 partai perebut kursi Senayan, 11 di antaranya masih mendapat elektabilitas di bawah 4 persen.

PAN dan PPP adalah partai yang pada periode 2019-2024 berhasil masuk parlemen, kini mendapat elektabilitas di bawah 4 persen, PAN (3,4 persen) dan PPP (1,6 persen).

Sedangkan partai baru maupun nonparlemen tidak ada yang mendapat elektabilitas di atas 4 persen. Partai nonparlemen dengan perolehan elektabilitas tertinggi adalah Perindo dengan 3,4 persen.

Di bawah tiga partai tersebut, elektabilitasnya di bawah 1 persen. Mayoritas mereka adalah partai baru, namun ada juga partai lama. Partai-partai tersebut adalah Partai Hanura (0,8 persen), PSI (0,8 persen), Partai Garuda (0,5 persen), Partai Gelora (0,4 persen), Partai Ummat (0,2 persen), PBB (0,1 persen), dan Partai Buruh (0,1 persen).

Di sisi lain, Partai kebangkitan Nusantara (PKN) tidak terekam pada hasil survei tersebut. Namun PKN tidak termasuk yang lolos ambang batas parlemen.

Sedangkan partai yang elektabilitasnya memenuhi ambang batas parlemen adalah PDIP (24,4 persen), Partai Gerindra (18,9 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (7,6 persen), Partai Golkar (7,2 persen), Partai Demokrat (7,0 persen), Partai Keadilan Sejahtera (6,3 persen), dan Partai Nasdem (5,9 persen). ●RDO





“Partai Demokrat tampaknya lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP daripada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan Puan Maharani aktif menyatukan kedua partai untuk berkoalisi”

Jamiluddin Ritonga

DEMOKRAT PASTI MERAPAT KE PDIP

Keputusan Partai Nasdem memilih PKB dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan menjadi pukulan telak bagi Partai Demokrat. Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa dikhianati setelah setahun berjalan bersama membentuk Koalisi Perubahan.

Buntut kekecewaan itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memutuskan keluar dari barisan Koalisi Perubahan. Bahkan, sejumlah kader yang marah langsung mencopot dan mencoret baliho partai bergambar AHY yang berdampingan dengan Anies.

AHY meminta seluruh kader untuk bersiap menyongsong lembaran baru dalam perjalanan politik partai menuju Pemilu 2024. Dia juga mengimbau agar ikhlas dan membuka pintu maaf kepada siapapun yang menyakiti partai berlambang mercy itu.

Putra sulung SBY ini juga meminta seluruh kader dan simpatisan agar dapat menyudahi seluruh rasa kecewa terhadap rekan koalisinya.

“Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru ke depan, kita harus segera move on,” tegas AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 September 2023.

Kini, Partai Demokrat siap membuka ruang komunikasi dengan koalisi yang sudah ada saat ini. Komunikasi tersebut terlebih dahulu akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk diputuskan bersama sebelum menjadi keputusan resmi.

“Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk berga-

bung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik,” ujarnya.

“Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik,” sambung Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, Partai Demokrat saat ini dalam posisi dilematis paska keputusannya hengkang dari Koalisi Perubahan.

Zaki menjelaskan, posisi dilematis itu diduga karena tidak banyak parpol yang merasa nyaman untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat yang memaksakan agar AHY diusung sebagai cawapres.

“Jadi saat ini Partai Demokrat dalam posisi dilematis. Mau ke mana-mana sulit. Tidak banyak pimpinan parpol yang merasa nyaman berunding dengan Pak SBY. Mau koalisi dengan PDIP ada kendala pertikaian lama dengan Bu Mega. Pak SBY sejak lama diketahui dianggap mengkhianati Bu Mega,” kata Zaki, Jumat, 8 September 2023.

Menurut Zaki, Demokrat juga akan menghadapi kesulitan apabila bergabung

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto. Sebab, posisi Prabowo dan SBY yang sama-sama merupakan mantan Jendral TNI menimbulkan persaingan ego antara keduanya terkait kepemimpinan.

“Gerindra dengan koalisi besarnya juga kurang membutuhkan PD, apalagi Pak SBY minta syarat macam-macam, jadi itu tidak mungkin ditawarkan cawapres. Sudah banyak yang ngantri,” ungkap Zaki.

Zaki menuturkan, kemungkinan munculnya poros baru atau poros keempat yang akan dibangun oleh Demokrat juga terlampau kecil peluangnya. Sebab, dua partai yang digadang-gadang bisa diajak kerja sama, yakni PKS dan PPP, juga tak berminat untuk membangun koalisi baru.

“Poros baru juga susah. PKS dan PPP tidak berminat buat poros baru hanya untuk kalah Pilpres. PPP sudah koalisi dengan PDIP. Jadi opsi ini tidak mungkin,” ujar Zaki.

Zaki mengatakan, yang paling memungkinkan posisi Demokrat saat ini yakni mengurungkan niat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan dan bergabung kembali guna membangun kerja sama politik dengan Nasdem, PKS dan PKB.

“Jadi, menurut saya itu yang paling mungkin ya, gabung lagi dengan koalisi lama plus PKB. Balik lagi mendukung Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024,” kata Zaki.

Kendati demikian, Zaki menambahkan, apabila Demokrat kembali ke Koalisi Perubahan, maka potensi AHY untuk maju menjadi cawapres akan kembali kandas. AHY kemungkinan hanya mendapat tawaran sebagai menteri jika Anies dan Cak Imin menang dalam Pilpres 2024.

“Jadi, opsi bagi AHY, anak emas Pak SBY, mungkin turun, menjadi salah satu menteri kalau koalisi ini menang. Ini juga masih ada persoalan, apa Surya Paloh mau menerima kembalinya Partai Demokrat,” ungkapnya.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, menilai Partai Demokrat tidak akan mudah membentuk poros baru atau poros keempat untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Demokrat bisa membentuk poros baru. Tapi itu tidak akan mudah. Perlu perhitungan dan lobi-lobi yang matang dengan PPP dan PKS,” kata Najmuddin.

PPP disebut bisa saja berkoalisi dengan Demokrat karena partai berlambang Ka’bah tersebut merasa tidak dianggap penting bagi PDIP. Karena PDIP dapat mengusung Ganjar Pranowo tanpa berkoalisi dengan partai lain. Sedangkan kader baru yang menjabat sebagai Badan Pemenangan Pemilu PPP, yakni Sandiaga Salahudin Uno, dinilai sangat berambisi ikut lagi di pilpres.

Sementara, PKS yang mengaku masih berkomitmen bersama Nasdem dan PKB mendukung Anies Baswedan dinilai rentan hengkang menyusul Demokrat. Karena PKS juga dianggap tidak terlalu berarti bagi Nasdem dan PKB yang telah mantap dengan pasangan Anies-Muhaimin.

Tapi yang jadi persoalan, menurut Najmuddin, apakah Sandiaga dari PPP mau hanya menjadi cawapres mendampingi AHY. Atau PKS hanya sebagai pelengkap dari koalisi baru tersebut.

Najmuddin menyarankan Demokrat bergabung saja dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo bersama Gerindra, PAN, dan Golkar. Di mana bila berhasil memenangkan Prabowo, AHY masih dapat mengamankan jatah kursi menteri.

Lalu, Demokrat juga punya kans merapat ke PDIP mendukung Ganjar karena sebelumnya sudah terjalin komunikasi politik yang cukup intens antara AHY dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

“Tinggal bagaimana menghangatkan lagi hubungan SBY dengan Megawati. Dua tokoh ini diketahui masih belum akrab sejak Pemilu 2004,” ucap Najmuddin.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meyakini Partai Demokrat tidak akan kembali lagi ke Koalisi Perubahan. Langkah politik Demokrat bisa saja diarahkan dengan bergabung ke PDIP.

“Partai Demokrat bisa saja berkoalisi dengan PDIP. Peluang itu dapat terwujud bila Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau melupakan masa lalu,” kata Jamiluddin, Jumat, 8 September 2023.

Kemungkinan Demokrat dan PDIP berkoalisi sangat terbuka karena Megawati dan SBY mempunyai kepentingan yang sama. Keduanya sama-sama ingin menang di Pilpres 2024.

“Untuk itu, kedua tokoh ini kemungkinan bersatu untuk mengalahkan Prabowo dan Anies Baswedan. Kepentingan ini bisa saja mengalahkan persoalan pribadi mereka selama ini,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo akan diduetkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, duet ini juga kompetitif, apalagi bila dihadapkan dengan pasangan Anies-Cak Imin serta Prabowo Subianto.

Jamiluddin melihat Partai Demokrat sulit berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sebab, Gerindra didukung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum.

“Jadi, Partai Demokrat tampaknya lebih berpeluang berkoalisi dengan PDIP daripada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan Puan Maharani aktif menyatukan kedua partai untuk berkoalisi,” katanya. ●RDO



“Walaupun Ganjar unggul di provinsi lain, namun jika ia kalah terlalu jomplang di Jawa Barat, hasil akhirnya secara nasional akan memperberat Ganjar berhadapan dengan Prabowo”

Saiful Mujani



PRABOWO KUASAI JAWA BARAT GANJAR DISUKAI ANAK MUDA

Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil penelitian terbarunya terhadap peta politik calon presiden pada pemilih di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survei 31 Juli hingga 11 Agustus 2023, diketahui sebanyak 31 persen masyarakat Jawa Barat memilih Ganjar Pranowo, sedangkan 57 persen mendukung Prabowo Subianto.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan, angka tersebut tidak mengalami perubahan dalam tiga kali survei terakhir pada Mei, Juli, dan Juli hingga Agustus 2023.

Saiful mengatakan, meski ada fluktuasi suara, namun secara umum bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengungguli Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

Fakta ini, menurut Saiful, menjadi tantangan yang sangat kuat bagi Ganjar. Jika Ganjar ingin menang dalam Pilpres 2024, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak boleh kalah terlalu banyak di Jawa Barat.

Menurut Saiful, jika selisihnya mencapai 30 persen, hal itu akan terlalu berat bagi Ganjar Pranowo menang secara nasional. Sebab, pemilih di Jawa Barat cukup besar. Sehingga, akan sangat mempengaruhi perolehan suara di nasional.

“Walaupun Ganjar unggul di provinsi lain, namun jika ia kalah terlalu jomplang di Jawa Barat, hasil akhirnya secara nasional akan memperberat Ganjar berhadapan dengan Prabowo,” jelas Saiful, Jumat, 8 September 2023.

Saiful juga menjelaskan terkait simulasi yang hanya memunculkan dua nama bakal calon presiden. Menurutnya, dari seluruh

hasil survei opini publik, ada kecenderungan yang paling kompetitif dan dibicarakan adalah dua nama tersebut, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Maka dari itu, dua nama tersebut yang paling berpotensi bertarung di putaran kedua jika di Pilpres 2024 lebih dari dua pasang calon. Saat ini, Menteri Pertahanan itu masih unggul jauh dari Ganjar Pranowo di Jawa Barat.

Dia menuturkan, keterpengaruhan agama tidak menjadi faktor penting atas keterpilihan Prabowo Subianto di Jawa Barat. Saiful meragukan hal tersebut.

Baik Prabowo maupun Ganjar, kata dia, keduanya berasal dari tradisi politik nasionalis. Prabowo tidak mengidentikkan dirinya sebagai kelompok Islam tertentu. Dia juga tidak menyatakan dirinya lebih Islam dibandingkan yang lain.

Dia pun tidak aktif di kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat Islam. Dalam hal-hal semacam itu, Prabowo kurang lebih sama dengan Jokowi dan Ganjar. Bahkan, mungkin Ganjar sedikit lebih dekat ke Islam. Misalnya karena istrinya adalah seorang nyai atau santri.

Saiful melihat, pola atau perilaku memilih warga dalam pilpres mungkin tidak terkait dengan Islam, dalam pengertian afiliasi calon pada kelompok Islam tertentu. Tetapi, mungkin terkait dengan Islam sebagai fakta sejarah di Jawa Barat.

“Yang lebih dominan mungkin adalah sentimen perlawanan masyarakat Jawa Barat pada kecenderungan yang dominan dalam politik nasional. Dalam sejarah, di Jawa Barat adalah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Di wilayah ini juga muncul gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII),” terang Saiful.

Sementara itu, Jokowi dan Ganjar adalah representasi politik Jawa yang dominan. Orang Jawa Barat ingin melihat perlawanan pada dominasi tersebut. Prabowo juga orang Jawa, namun di mata pemilih Jawa Barat, Prabowo terlihat melawan dominasi

atau orang yang dominan tersebut. Prabowo dianggap sebagai wakil perlawanan mereka dalam konteks politik nasional.

“Namun ini adalah salah satu tafsir yang membutuhkan eksplorasi data lebih jauh,” terangnya.

Pilihan Anak Muda

Sementara itu, hasil survei terbaru dari Ipsos Publik Affairs mencatat, kalangan milenial dan Gen Z cenderung memilih Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan peneliti senior Ipsos Publik Affairs, Arif Nurul Imam.

Dia mengatakan, elektabilitas Ganjar Pranowo di kalangan milenial dan Gen Z cukup tinggi. Di kalangan milenial, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 39,9 persen dan Gen Z sebesar 42,4 persen.

Dia menjelaskan, penyebab elektabilitas Ganjar Pranowo cukup besar di kalangan milenial dan Gen Z. Kata Arif, Ganjar sangat aktif di media sosial jika dibandingkan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.

“Ganjar lebih diterima di kalangan milenial dan Gen Z karena Ganjar lebih aktif di media sosial,” kata Arif.

Dia menuturkan, keaktifan Ganjar Pranowo di media sosial menjadi daya tarik sendiri bagi kalangan milenial dan Gen Z. Bahkan, kerap kali Ganjar Pranowo selalu berinteraksi dengan para followernya.

Dia menilai, Ganjar Pranowo sangat piawai memainkan media sosial miliknya. Sehingga, mudah sekali untuk menggaet pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z.

“Karena itu, dibandingkan Prabowo dan Anies, Ganjar jauh lebih aktif dan atraktif di medsos,” jelas Arif.

Dikatakan Arief, pemilih muda di Pilpres 2024 sangat penting. Sebab, hampir 60 persen dari jumlah total suara merupakan suara pemilih muda. Sehingga, suara dari kalangan milenial dan Gen Z sangat penting bagi seluruh kandidat capres.

Berdasarkan survei Ipsos Publik Affairs, elektabilitas Ganjar Pranowo di kalangan Gen Z unggul dari pesaingnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ganjar Pranowo memperoleh 42,4 persen, Prabowo Subianto 41,6 persen, dan Anies Baswedan 16 persen.

Sedangkan di kalangan milenial, Ganjar Pranowo masih tetap mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Di kalangan milenial elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 39,9 persen, Pranowo 35,71 persen, dan Anies Baswedan 24,38 persen.

Survei Ipsos dilakukan pada 22-27 Agustus 2023 di 24 provinsi, pada daerah perkotaan dan perdesaan. Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan 1.200 responden dan menggunakan aplikasi Ipsos Ifield yang merupakan sistem computer-assisted personal interviews (CAPI). Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

• RDO

